



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 167. K/04/MEM/2020

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempermudah penataan, pengelolaan, penyimpanan, penggunaan, dan penemuan kembali arsip, perlu mengatur klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. bahwa untuk perlindungan terhadap keamanan, pengelolaan, dan kemudahan akses arsip bagi publik serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak, perlu mengatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan berdasarkan fungsi:

- a. substantif; dan
- b. fasilitatif.

KEDUA : Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Berdasarkan Fungsi Substantif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Berdasarkan Fungsi Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Klasifikasi Arsip disusun menggunakan pola klasifikasi dengan pedoman penerapannya secara umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip merupakan sistem yang terdiri atas:

- a. klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/terbuka, terbatas, rahasia, atau sangat rahasia; dan
- b. klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal,

dengan pedoman penerapannya tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Penerapan akses arsip selain di luar pengguna yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini, harus berdasarkan persetujuan Pencipta Arsip atau Pejabat yang berwenang.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 167.K/04/MEM/2020

TANGGAL : 8 September 2020

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
BERDASARKAN FUNGSI SUBSTANTIF

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
I 1	GL GL.01 GL.01.01	V	V	V	GEOLOGI Kebijakan Pengusulan Kebijakan	Rekaman kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan Pengusulan Kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Sekretariat Badan Geologi
	GL.01.02			V	Penyiapan Kebijakan	Rekaman kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan Penyiapan Kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Sekretariat Badan Geologi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	GL.01.03			V	Perumusan Kebijakan	Rekaman kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan Perumusan Kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Sekretariat Badan Geologi
	GL.01.04			V	Penetapan Kebijakan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Rekaman kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan Penetapan Kebijakan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat Badan Geologi
2	GL.02		V		Kerja sama	Rekaman kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan Kerja sama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Sekretariat Badan Geologi
3	GL.03 GL.03.01		V	V	Rekomendasi Kegeologian Mitigasi gunungapi, gempa bumi dan tsunami, gerakan tanah	Rekaman kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan: a. Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan Tanah/Tanah Longsor dan Banjir Bandang b. Mitigasi Bencana Geologi (Letusan Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi, dan Tsunami)	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	GL.03.02			V	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	<p>c. Rencana Kontijensi Bencana Geologi (Gunungapi, Gempabumi, Gerakan Tanah, dan Tsunami)</p> <p>d. Analisis Risiko Bencana Geologi (Gunungapi, Gempabumi, Gerakan Tanah, dan Tsunami)</p> <p>e. Penetapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Status Aktivitas Gunungapi 2. Penetapan Klasifikasi Gunungapi 3. Penetapan Kawasan Rawan Bencana Gunungapi 4. Penetapan Zona Kerentanan Gerakan Tanah 5. Penetapan Kawasan Rawan Bencana Gempabumi 6. Penetapan Kawasan Rawan Bencana tsunami <p>Rekaman kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Penetapan Cekungan Air Tanah</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian</p>	<p>Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi</p> <p>Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	GL.03.05			V	Geosains	b. Pengklasifikasian dan Penghitungan Potensi Mineral dan Panas Bumi Rekaman kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan: a. Geologi b. Geofisika c. Geokimia	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi Pusat Survei Geologi Pusat Survei Geologi Pusat Survei Geologi
	GL.03.06			V	Pengukuran <i>Time Domain Electromagnetic</i> (TDEM)	Rekaman kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan Pengukuran <i>Time Domain Electromagnetic</i> (TDEM)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Survei Geologi
	GL.03.07			V	Kelayakan Lingkungan	Rekaman kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan: a. Penetapan Cagar Alam Geologi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
4	GL.04 GL.04.01		V	V	Penelitian Kegeologian Administrasi Penelitian	<p>b. Penyelidikan Geologi Teknik Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah</p> <p>c. Penentuan dan Kriteria Kelayakan Geologi Lingkungan Untuk Kelayakan Penambangan</p> <p>d. Penetapan Kawasan Lindung Geologi</p> <p>e. Kajian Wilayah Keprospekan Untuk Penyiapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)/Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi, Mineral dan Batubara</p> <p>Rekaman kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Pelaksanaan, meliputi:</p> <p>1. Surat ijin survei/penelitian</p> <p>2. Pemetaan, Penelitian, Pengkajian, Perencanaan, Survei Pendahuluan, Studi Kelayakan, Pengembangan Wilayah, dan Inventarisasi antara lain:</p> <p>a) Proposal</p> <p>b) Persiapan survei, rencana operasional termasuk jadwal kegiatan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian</p>	<p>Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan</p> <p>Pusat Survei Geologi</p> <p>Pusat Survei Geologi</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	GL.04.02			V	Hasil Penelitian dan Penyelidikan Kegeologian	d. Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi Rekaman kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan Hasil Penelitian dan Penyelidikan Kegeologian	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Survei Geologi
	GL.04.03			V	Sumber Daya Geologi	Rekaman kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan: a. Data Lapangan b. Data Laboratorium c. Laporan hasil penelitian: 1. Logam	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Survei Geologi
							Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi
							Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi
							Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						2. Non Logam	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi
						3. Batubara	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi
						4. Panas Bumi	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi
						5. Geofisika	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi
						6. Geokimia	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	GL.04.04			V	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	7. Minyak dan Gas Bumi 8. Neraca Sumber Daya Geologi d. Peta 1. Potensi Sumber Daya Geologi 2. Sebaran Geokimia Rekaman kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan:	Rahasia Rahasia Rahasia Rahasia Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara sumber daya nasional, dan ketertiban umum Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						a. Data Lapangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
						b. Data Laboratorium	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
						c. Peta				
						1. Hidrogeologi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
						2. Potensi Air Tanah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
						3. Imbuhan dan Lepasana Air Tanah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
						4. Konservasi Air Tanah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						5. Cekungan Air Tanah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
						6. Geologi Lingkungan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
						7. Kawasan Karst	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
						8. Kawasan Lindung Geologi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
						9. Rekomendasi Penggunaan Lahan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
						10. Kawasan Pertambangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						11. Geologi Teknik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
						12. Kelayakan Pertambangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
						13. Rekomendasi Kawasan Peruntukan Pertambangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
						14. Geologi Lingkungan untuk Resapan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
					d. Laporan hasil Penelitian dan Penyelidikan					
					1. Laporan Hasil Survei Air Tanah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian		Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
					2. Laporan Survei Geologi Teknik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian		Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	GL.04.05			V	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	3. Laporan Survei Geologi Lingkungan 4. Laporan Pengeboran Air Tanah Rekam kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan: a. Data Lapangan 1. Tiltmeter Gunungapi 2. Sipat Datar (levelling) Gunungapi 3. Suhu Kawah dan Mata Air Panas Gunungapi	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						4. Suhu Air dan Udara Gunungapi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						5. Seismik Gunungapi (Analog dan Digital)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						6. Seismik Gempabumi (Digital)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						7. Geofisika (Geomagnet, Geolistrik, Gravity, dan Georadar)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						8. Ekstensiometer Gunungapi, Kelembaban dan Curah hujan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						9. Visual Gunungapi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						10. Pengukuran <i>Electronic Distance Measurement</i> (EDM) (Gunungapi, Tsunami, dan Gerakan Tanah)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						11. Pengukuran <i>Global Positioning System</i> (GPS) (Gunungapi, Gerakan Tanah, dan Gempabumi)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						b. Data Laboratorium				
						1. Kimia Gas Gunungapi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						2. Kimia Air Gunungapi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						3. Kimia Batuan Gunungapi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						c. Peta				
						1. Sebaran Gunungapi Aktif di Indonesia	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						2. Geologi Gunungapi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						3. Kawasan Rawan Bencana Gunungapi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						4. Zona Risiko Bencana Geologi (Gunungapi, Gempabumi, Gerakan Tanah, dan Tsunami)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						5. Kawasan Rawan Bencana (KRB) dan Terdampak Erupsi Gunungapi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						6. Operasional Laharan Gunung Merapi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						7. Wilayah Rawan Gempa Bumi Indonesia	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						8. Sesar Aktif dan Sebaran Pusat Gempa Bumi merusak Wilayah Indonesia	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						9. KRB Gempa Bumi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						10. KRB Tsunami	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						11. Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						12. Digital KRB Gunungapi, Gempa Bumi, Tsunami, dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						13. Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan Tanah (Seluruh Provinsi di Indonesia tiap-tiap bulan)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						14. Sebaran Kawasan Gempa Bumi Merusak	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						15. Sebaran Kawasan Bencana Tsunami	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						d. Laporan 1. Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah 2. Penelitian Gunungapi, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah 3. Penelitian Bencana Geologi Lainnya (Semburan Gas/Lumpur dan Kebakaran Batubara) 4. Pos Pengamatan Gunungapi 5. Pasca Bencana Geologi (Gunungapi, Gempa Bumi, Tsunami dan Gerakan Tanah) 6. Sosialisasi/Penyuluhan Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						7. Kontijensi Gunungapi Gerakan Tanah, Gempa Bumi, Gerakan Tanah dan Tsunami	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						8. Pelatihan Evaluasi Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						9. Analisis Risiko Gunungapi, Gempa Bumi, Gerakan Tanah dan Tsunami	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						10. Modeling Abu Gunungapi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						11. Modeling Lahar	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						12. Wisata Gunungapi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						13. Dokumentasi Gunungapi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						14. Workshop Gunungapi, Gempa Bumi, Gerakan Tanah, dan Tsunami	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						15. Pameran Gunungapi, Gempa Bumi, Gerakan Tanah dan Tsunami	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						16. Pemantauan Gerakan Tanah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						17. Peringatan Dini Gerakan Tanah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						18. Tanggapan Kejadian Gempa Bumi/ Tsunami	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						19. Tanggap Darurat Gerakan Tanah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						20. Analisis Stabilitas Lereng	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						21. Tanggapan Bencana Gerakan Tanah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						22. Hasil Pemeriksaan Bencana Gerakan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						23. Peringatan Dini Letusan Gunungapi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						24. Tanggap Darurat Letusan Gunungapi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						25. Pemantauan Gunungapi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						26. Penyelidikan Geokimia, Gunungapi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						27. Pemantauan Terpadu	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						28. Evaluasi Aktivitas Gunungapi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						29. Penyelidikan Deformasi Gunungapi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						30. Penelitian Gunungapi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
						e. Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi				
						1. Pengembangan Peralatan Mitigasi Bencana Geologi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						4. Data Dasar Stratigrafi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Survei Geologi
						5. Geofisika Bersistem	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Survei Geologi
						6. Seismotektonik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Survei Geologi
						7. Gaya Berat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Survei Geologi
						8. Geologi Rinci	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Survei Geologi
						9. Geomorfologi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Survei Geologi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						10. Cekungan Sedimen	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Survei Geologi
						11. Anomali Magnet Bersistem	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Survei Geologi
						12. Geologi Kuarter	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Survei Geologi
						13. Sebaran Radiometri	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Survei Geologi
					d. Laporan Hasil Penelitian					
					1. Hasil Penelitian dan Penyelidikan Jaman Belanda	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja		Pusat Survei Geologi
					2. Jaarboek	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja		Pusat Survei Geologi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
5	GL.05 GL.05.01 GL.05.02 GL.05.03		V	V	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian Sumber Daya Geologi	3. Geologi pra 1850-1945	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Survei Geologi
						4. Geologi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Survei Geologi
						e. Publikasi Ilmiah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum
						Rekaman kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan Sumber Daya Geologi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi
			V	V	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Rekaman kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
			V	V	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Rekaman kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
6	GL.05.04			V	Survei Geologi	Rekaman kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan Survei Geologi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Survei Geologi
	GL.05.05			V	Konservasi	Rekaman kegiatan, peristiwa atau surat yang berkaitan dengan Konservasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Survei Geologi
	GL.06.01			V	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi Peta potensi dan sebaran	Rekaman kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan:	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi
				a. Mineral Logam		Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi	
			b. Mineral Non Logam	Terbatas		Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi		
			c. Batubara, Gambut, dan Bitumen Padat	Terbatas		Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi		
				d. Panas Bumi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi		

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	GL.06.02			V	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	<p>e. Konservasi</p> <p>Rekaman kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Pelayanan Jasa dan Informasi Air Tanah</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi</p> <p>Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan</p>
	GL.06.03			V	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara	<p>c. Pelayanan Jasa dan Informasi Geologi Lingkungan</p> <p>Rekaman kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Pelayanan Jasa dan Informasi Geologi Teknik</p> <p>a. Pelayanan Informasi Bencana Geologi (Gunungapi, Gempabumi, Gerakan Tanah, dan Tsunami)</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan</p> <p>Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan</p> <p>Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi</p>
	GL.06.04			V	Survei Geologi	<p>b. Pelayanan Jasa dan Informasi Geologi Teknik</p> <p>b. Pelayanan Foto dan Film Kebencanaan Geologi</p> <p>Rekaman kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan:</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan</p> <p>Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						a. Penyajian Data dan Informasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Survei Geologi
						b. Analisis Cekungan, Pemodelan, dan Kajian Prospek	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Survei Geologi
						c. Data Spasial Berbasis Geosains	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Survei Geologi
						d. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Data dan Informasi Digital Geologi dan Geofisika	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kegeologian	Pusat Survei Geologi
						e. Peta Topografi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Survei Geologi
						f. Pelayanan Jasa Museum	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Pusat Survei Geologi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
II	MB	V			MINERAL DAN BATUBARA					
1	MB.01		V		Kebijakan					
	MB.01.01			V	Pengusulan Kebijakan	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Pengusulan Kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
	MB.01.02			V	Penyiapan Kebijakan	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Penyiapan Kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
	MB.01.03			V	Perumusan Kebijakan	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Perumusan Kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
	MB.01.04			V	Penetapan Kebijakan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Penetapan Kebijakan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
2	MB.02		V		Kerja sama	Rekaman kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan Kerja sama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
3	MB.03		V		Bina Program Mineral dan Batubara	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: Rencana Induk Mineral dan Batubara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
	MB.03.01			V	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara					
	MB.03.02			V	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Investasi Bidang Mineral dan Batubara 1. Rencana dan Realisasi Investasi Mineral dan Batubara 2. Rencana Induk Investasi Mineral dan Batubara 3. Kajian Peluang Investasi Mineral dan Batubara 4. Promosi Investasi Mineral dan Batubara	Terbatas Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.03.03			V	Data dan Informasai Mineral dan Batubara	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Data Cadangan Strategis b. Hasil Uji petik Pengelolaan Administrasi Pertambangan c. Data Harga Mineral dan Batubara d. Data Ekspor Mineral dan Batubara	Rahasia Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
	MB.03.04			V	Pelaporan Program Mineral dan Batubara	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Laporan Tahunan Program Kegiatan Mineral dan Batubara b. Laporan Semester usaha pertambangan Minerba	Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.03.05			V	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Perencanaan Wilayah Kerja Izin Usaha Pertambangan 1. Wilayah izin Usaha Pertambangan 2. Penetapan Eksplorasi Mineral dan Batubara 3. Penetapan Eskploitasi Mineral dan Batubara 4. Berita Acara Penetapan Batas Wilayah Kuasa Pertambangan 5. Pertimbangan Teknis	Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						6. Penetapan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
						7. Izin Prinsip	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
						8. Penetapan Daerah Penghasil Mineral dan Batubara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
						9. Peta Wilayah Daerah Penghasil Mineral dan Batubara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
						10. Data Wilayah Administrasi Usaha Pertambangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
						b. Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara Melalui Lelang Reguler 1. Penyiapan Wilayah Kerja (WK)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						2. Penawaran Wilayah Kerja (WK)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
						3. Pengajuan Permintaan Wilayah Kerja (WK) Oleh Badan Usaha	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
						4. Informasi Penawaran Wilayah Kuasa Pertambangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
						5. Penetapan Provinsi/Pusat dalam rangka Penawaran wilayah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
						6. Penangguhan Proses Usulan Wilayah Kerja (WK) Baru	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
						7. Perpanjangan Pengelolaan Wilayah Kerja (WK)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi mineral dan batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						8. Penetapan Wilayah Kerja (WK), Bentuk, dan Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama (KKS)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
						9. Dokumen KKS Mineral dan Batubara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
						10. Promosi Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
						11. Pengumuman Tender Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
						12. Izin Survei Umum	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
						13. <i>Security Clearance</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.03.06			V	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara	Rekaman kegiatan dan peristiwa, yang berkaitan dengan: a. Data wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara b. Informasi wilayah IUP Mineral dan Batubara c. Inventarisasi Data IUP d. Pelelangan Wilayah Usaha Pertambangan e. Workshop Sistem Informasi Wilayah Pertambangan	Rahasia Biasa/Terbuka Rahasia Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
3	MB.03.07			V	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Rencana Produksi Mineral dan Batubara Nasional b. Rencana Produksi Batubara dari IUP	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
	MB.03.08			V	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Pemanfaatan Mineral untuk Kebutuhan dalam negeri b. Pasokan Batubara untuk Kebutuhan dalam negeri c. Neraca Mineral dan Batubara Nasional d. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam dan Non Logam e. Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Mineral dan Batubara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
	MB.04.01		V	V	Pembinaan Pengusahaan Mineral Ketenagakerjaan	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) dan tenaga kerja Indonesia Perusahaan kontrak karya, Perusahaan IUP, dan Pemegang izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) b. Rekomendasi Penggunaan Tenaga Asing Kontrak Karya (KK), IUP, dan IUJP c. Rekomendasi <i>Security clearance</i> di Perusahaan KK	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
							Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
							Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.04.02			V	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat di Perusahaan KK b. Pemetaan Kebutuhan Masyarakat sekitar tambang wilayah KK	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
	MB.04.03			V	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Laporan Evaluasi Perselisihan KK dengan masyarakat sekitar tambang KK b. Data Fasilitasi Perselisihan ketenagakerjaan KK c. Laporan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.04.05			V	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Kegiatan eksplorasi KK b. Studi kelayakan KK c. Pengawasan Tahap Kontruksi d. Komparasi kegiatan eksplorasi pertambangan mineral	Rahasia Terbatas Biasa/Terbuka Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
	MB.04.06			V	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam, batuan, radioaktif, dan mineral jarang)	Rekaman kegiatan dan peristiwa, yang berkaitan dengan: a. Produksi Mineral KK dan IUP	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.04.07			V	Perizinan usaha pertambangan mineral	b. Pemasaran mineral KK dan IUP c. Kebutuhan DMO Mineral d. Laporan Pengawasan pada Perusahaan Kontrak Karya e. Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Mineral Rekaman kegiatan dan peristiwa, yang berkaitan dengan: a. IUP, KK sesuai kewenangan	Rahasia Biasa/Terbuka Rahasia Terbatas Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						b. Penciutan Wilayah KK, IUP	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
						c. Perpanjangan KK	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
						d. Pengangkutan Penjualan	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
						e. Pengolahan, Pemurnian	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
						f. IUP Mineral logam	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
						g. Registrasi Perpanjangan IUP	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.04.08			V	Kontrak Karya (KK)	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Renegoisasi Kontrak dan Dokumen Pendukung Lainnya b. Amandemen Kontrak 1. Draft amandemen 2. Berita Acara 3. Dokumen kontrak	Sangat Rahasia Sangat Rahasia	Pejabat Tinggi Utama, Pengawas Internal/Eksternal, dan Penegak Hukum Pejabat Tinggi Utama, Pengawas Internal/Eksternal, dan Penegak Hukum	Membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa Membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa.	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
	MB.04.09			V	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)	Rekaman kegiatan dan peristiwa, yang berkaitan dengan: a. Persetujuan pengadaan barang modal (Masterlist) Perusahaan Mineral b. Rekomendasi Pemindahtanganan barang modal dan Peralatan Perusahaan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						c. Data Kandungan lokal alat tambang perusahaan mineral	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
						d. Data Penggunaan Barang Modal KK	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
						e. Rekomendasi reeksport/remanufaktur barang modal perusahaan mineral	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
						f. Data infrastruktur pada perusahaan mineral	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
						g. Data Investasi pada perusahaan mineral	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi mineral dan batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
						h. Data Aset perusahaan mineral	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.04.10			V	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	i. Rekomendasi baru dan perubahan Angka Pengenal Import Produsen (APIP) KK j. Persetujuan Amandemen/perubahan barang modal perusahaan KK	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
	MB.04.11			V	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
	MB.04.12			V	Teguran kepada-perusahaan Kontrak Karya (KK)	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Teguran kepada perusahaan Kontrak Karya (KK)	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
	MB.04.13			V	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
	MB.04.12			V	Teguran kepada-perusahaan Kontrak Karya (KK)	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Teguran kepada perusahaan Kontrak Karya (KK)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
	MB.04.13			V	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.04.14			V	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
	MB.04.15			V	Pelaporan usaha pertambangan mineral	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Triwulan Kontrak Karya (KK) b. Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) Kontrak Karya (KK) c. Kemajuan Kontrak Karya (KK) d. Laporan Tahunan Kontrak Karya (KK)	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
							Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
							Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
4.	MB.04.16			V	Penghargaan usaha pertambangan mineral	Rekaman kegiatan dan peristiwa, yang berkaitan dengan Penghargaan usaha pertambangan mineral	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
	MB.04.17			V	Penerbitan sertifikat <i>clear and clean</i> (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Dokumen Pendukung 1. Dokumen Surat Keputusan 2. Peta b. Sertifikat 1. Laporan Eksplorasi 2. Laporan Studi Kelayakan 3. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) 4. Hasil Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
	MB.05.01		V	V	Pembinaan Pengusahaan Batubara Ketenagakerjaan	Rekaman kegiatan dan peristiwa, yang berkaitan dengan: a. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) dan Tenaga Kerja Indonesia pada Perusahaan Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan PKP2B	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.05.02			V	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	b. Rekomendasi Penggunaan Tenaga Asing Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)/IUP/IUJP c. Rekomendasi <i>Security Clearance</i> (SC) PKP2B Rekaman kegiatan dan peristiwa, yang berkaitan dengan: a. Laporan Pelaksanaan <i>Community Development</i> (CD) PKP2B/IUP/IUJP	Terbatas Rahasia Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara sumber daya nasional, ketertiban umum Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
	MB.05.03			V	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Data Perselisihan Usaha Jasa dan Wilayah Kerja PKP2B	Terbatas Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.05.04			V	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara	b. Data Fasilitas Perselisihan Ketenagakerjaan PKP2B c. Tumpang Tindih Lahan Usaha Pertambangan Batubara Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Laporan Kegiatan Eksplorasi PKP2B b. Persetujuan Tekno-Ekonomi PKP2B c. Persetujuan Akhir Studi Kelayakan PKP2B	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						d. Persetujuan RKAB tahap Kegiatan Eksplorasi PKP2B	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
						e. Persetujuan RKAB tahap Kegiatan Studi Kelayakan PKP2B	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
						f. Rekomendasi Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi PKP2B	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
						g. Rekomendasi Peningkatan ke tahap kegiatan Studi Kelayakan PKP2B	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
						h. Rekomendasi Perpanjangan tahap Studi Kelayakan PKP2B	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
						i. Rekomendasi Peningkatan ke tahap kegiatan Konstruksi PKP2B	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.05.05			V	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Kegiatan Eksplorasi PKP2B b. Studi Kelayakan PKP2B c. Data hasil kegiatan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Wilayah Penciutan PKP2B	Terbatas Terbatas Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara sumber daya nasional, ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
	MB.05.06			V	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut)	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B dan IUP b. Laporan Triwulan <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) Batubara	Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.05.08			V	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	<p>d. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian</p> <p>e. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan</p> <p>Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Renegoisasi Kontrak PKP2B dan Dokumen pendukung</p> <p>b. Amandemen Kontrak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft amandemen 2. Berita Acara 3. Dokumen Kontrak 	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Sangat Rahasia</p> <p>Sangat Rahasia</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Tinggi Utama, Pengawas Internal/Eksternal, dan Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Tinggi Utama, Pengawas Internal/Eksternal, dan Penegak Hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara</p> <p>Membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa</p> <p>Membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa.</p>	<p>Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara</p> <p>Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara</p> <p>Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara</p> <p>Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara</p>
	MB.05.09			V	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	<p>Rekaman kegiatan dan peristiwa, yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B</p>	<p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara</p>	<p>Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						b. Rekomendasi Pemindahtanganan Barang Modal dan Peralatan Perusahaan c. Data Kandungan Lokal Alat Tambang d. Tongkang e. Data Penggunaan Barang Modal PKP2B f. Rekomendasi Reeksport/Remanufaktur Barang Modal Perusahaan Batubara g. Data Infrastruktur pada Perusahaan PKP2B	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.05.10			V	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	h. Data Investasi pada Perusahaan Batubara	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
	MB.05.11			V	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	i. Data Asset Perusahaan Batubara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
	MB.05.12			V	Teguran kepada pengusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan:Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
	MB.05.13			V	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: Teguran kepada pengusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
				V	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan:Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.05.14			V	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	Rekaman kegiatan, dan peristiwa yang berkaitan dengan Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
	MB.05.15			V	Pelaporan usaha pertambangan batubara	Rekaman kegiatan, dan peristiwa yang berkaitan dengan Pelaporan usaha pertambangan batubara a. Triwulan PKP2B dan IUP	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
						b. RKAB PKP2B	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
						c. Kemajuan PKP2B	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
						d. Tahunan PKP2B	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
						e. RKAB IUP Operasi Produksi Khusus (OPK)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH		
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER								
1	2	3			4	5	6	7	8	9		
5.	MB.05.16	V	V	V	Penghargaan usaha pertambangan batubara	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Penghargaan usaha pertambangan batubara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara		
	MB.05.17				Penerbitan sertifikat <i>Clear and Clean</i> (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara	Rekaman kegiatan dan peristiwa, berkaitan dengan:	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara		
	MB.06				V	Penerimaan Negara	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan:	a. Dokumen Pendukung	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
								1. Dokumen Surat Keputusan 2. Peta Wilayah				
MB.06.01	V	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan:	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja KESDM	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara					
					b. PNBP Penjualan Ekspor Mineral dan Batubara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja KESDM	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara			

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.06.02			V	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	<p>c. Mekanisme penyetoran PNPB</p> <p>d. Penyaluran PNPB Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum</p> <p>Rekaman kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Minerba (PKPD)</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja KESDM</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja KESDM</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja KESDM</p>	<p>Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara</p> <p>Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara</p> <p>Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara</p>
	MB.06.03			V	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNPB	<p>Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Laporan Verifikasi PNPB Usaha Pertambangan</p> <p>b. PNPB Kuasa Pertambangan (KP)/IUP yang belum dibagihasilkan</p>	<p>Batas</p> <p>Batas</p> <p>Batas</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara</p>	<p>Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara</p> <p>Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						c. PNBP dari Kontrak Karya (KK)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
						d. PNBP dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
						e. PNBP dari Kuasa Pertambangan (KP)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
						f. PNBP dari Izin Usaha Pertambangan (IUP)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
						g. Potensi PNBP dari KP/IUP	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
						h. Surat Tagihan Atas Pemeriksaan Temuan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
						i. Bukti Setor Perusahaan Atas Pemeriksaan Temuan Tim BPK RI	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
6.	MB.07		V		Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Draft Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)/ Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi) b. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)/Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi) hasil Konsensus/Konvensi c. Standar Nasional Indonesia (SNI)/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja KESDM Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja KESDM Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja KESDM	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
	MB.07.01			V	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNi (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)					
	MB.07.02			V	Pengawasan Standardisasi	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: Pengawasan Standardisasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja KESDM	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
	MB.07.03			V	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Permohonan Pengajuan Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja KESDM	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						f. Rekomendasi Izin Pembelian dan Penggunaan (P2) Bahan Peledak (Izin dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
						g. Rekomendasi Pemusnahan Bahan Peledak (Izin dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
						h. Register Nomor Sertifikat dan Izin	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
						i. SKPP (Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
						j. Dokumen Surat Keputusan dan Lampiran Kapal Keruk/Kapal Isap	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
						k. Dokumen Surat Keputusan dan Lampiran Tangki Bahan Bakar Cair	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.07.06			V	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	l. Surat Tugas Inspeksi m. Berita Acara Hasil Inspeksi n. Surat Rekomendasi Perbaikan Hasil Inspeksi Rekaman kegiatan dan peristiwa, yang berkaitan dengan: a. Surat Rekomendasi Teknis Studi AMDAL (Kerangka Acuan AMDAL, ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL)) b. Berita Acara Pembahasan Dokumen AMDAL c. Surat Persetujuan dan Dokumen AMDAL	Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.07.07			V	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Surat Permohonan Persetujuan Dokumen UKL/UPL b. Berita Acara Pembahasan Dokumen c. Surat Persetujuan dan Dokumen UKL/UPL	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
	MB.07.08			V	Rekomendasi bahan kimia	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Rekomendasi bahan kimia	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
	MB.07.09			V	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Rekaman kegiatan dan peristiwa, yang berkaitan dengan : a. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) b. Laporan Pelaksanaan UKL/UPL	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						c. Laporan Catatan Perusahaan Tentang Terjadinya Pencemaran Lingkungan (CPL)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
						d. Laporan Terjadinya Pencemaran (Laporan Pengelolaan Lingkungan/LPL-1)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
						e. Laporan Hasil Analisa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
						f. Laporan Pengelolaan Lingkungan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
						g. Dokumen Rencana Reklamasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
						h. Surat Penetapan Jaminan Reklamasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.07.10			V	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi	i. Laporan Data Penggunaan Lahan Pertambangan j. Dokumen Rencana Pasca Tambang k. Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang Rekaman kegiatan dan peristiwa, yang berkaitan dengan: a. Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) b. Laporan Bulanan Bahan Kimia untuk Penanggulangan Pencemaran dan Proses Produksi (LPL-2) c. Laporan Bulanan Analisa Air Buangan (LPL-5)	Terbatas Terbatas Terbatas Rahasia Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Mengakibatkan terganggunya tugas dan fungsi mineral dan batubara penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.07.12			V	Pengawasan lingkungan pertambangan	<p>c. Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan</p> <p>d. Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan</p> <p>Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Surat Tugas Inspeksi</p> <p>b. Tindak Lanjut Hasil Inspeksi</p> <p>c. Supervisi</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara</p>
	MB.07.13			V	Usaha Jasa Mineral dan Batubara	<p>Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Izin Usaha Jasa Pertambangan</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara</p> <p>Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.07.14			V	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Laporan Pembinaan Usaha Jasa Mineral dan Batubara b. Laporan Hasil Pengawasan Usaha Jasa Mineral dan Batubara c. Laporan Hasil Evaluasi Triwulan/Tahun IUJP	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
	MB.07.15			V	Rekomendasi Teknis	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis b. Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis c. Surat Rekomendasi Teknis	Terbatas Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.07.16			V	Persetujuan Teknis	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis b. Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis c. Surat Persetujuan Teknis	Terbatas Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
	MB.07.17			V	Pengawasan Teknis	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Surat Tugas pengawasan b. tindak Lanjut hasil Pengawasan c. Pemantauan Kegiatan Pengelolaan Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Mineral dan Batubara Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi mineral dan batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MB.07.18			V	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Surat Tugas Inspeksi Konservasi Mineral dan Batubara b. Tindak Lanjut hasil Inspeksi	Biasa/Terbuka Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi mineral dan batubara	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
	MB.07.19			V	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Berkas dan Laporan Sosialisasi Standardisasi b. Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan c. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan d. Peningkatan Pemahaman Aparat Pemerintah Daerah Bidang Lingkungan Pertambangan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
III	MG	V			MINYAK DAN GAS BUMI					
1.	MG.01 MG.01.01		V	V	Kebijakan Pengusulan Kebijakan	Rekaman kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan Pengusulan Kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Minyak dan Gas Bumi	Sekretariat Ditjen Minyak dan Gas Bumi
	MG.01.02			V	Penyiapan Kebijakan	Rekaman kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan Penyiapan Kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Minyak dan Gas Bumi	Sekretariat Ditjen Minyak dan Gas Bumi
	MG.01.03			V	Perumusan Kebijakan	Rekaman kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan Perumusan Kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Minyak dan Gas Bumi	Sekretariat Ditjen Minyak dan Gas Bumi
	MG.01.04			V	Penetapan Kebijakan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Rekaman kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan Penetapan Kebijakan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Minyak dan Gas Bumi	Sekretariat Ditjen Minyak dan Gas Bumi
2.	MG.02		V		Kerja Sama	Rekaman kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan Kerja sama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Minyak dan Gas Bumi	Sekretariat Ditjen Minyak dan Gas Bumi
3.	MG.03		V		Pembinaan Program	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Program Minyak dan Gas Bumi				
	MG.03.01			V	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan rencana induk jaringan gas bumi				

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MG.03.02			V	Rencana dan Realisasi Investasi	a. Rencana Jangka Panjang b. Rencana Strategis c. Rencana Tahunan e. Evaluasi dan Pelaporan f. Laporan Tahunan Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Rencana dan Realisasi Investasi Minyak dan Gas Bumi	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/terbuka Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MG.03.03			V	Penetapan Harga Minyak Mentah	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan: a. <i>Harga Indonesian Crude Price (ICP)</i> b. <i>Formula Indonesian Crude Price (ICP)</i> c. <i>Liquefied Natural Gas (LNG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Price Reference</i> d. <i>Data Harga Minyak Dunia</i>	Biasa/Terbuka Rahasia Rahasia Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara sumber daya nasional, ketertiban umum termasuk dampak ekonomi makro Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum Tidak mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum termasuk dampak ekonomi makro	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
	MG.03.04			V	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penetapan PNBP Minyak dan Gas Bumi, meliputi:				

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						a. Monitoring Lifting	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara terkait dengan daerah penghasil	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
						b. Prognosa Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigasan	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
						c. Data Estimasi Distribusi <i>Revenue</i> dan <i>Entitlement</i> Pemerintah	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
						d. Berita Acara Bagi Hasil SDA Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigasan	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
						e. Data Ekspor LNG, LPG, Natural Gas	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara sumber daya nasional	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
						f. Surat Keputusan Penetapan Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara sumber daya nasional	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MG.03.05			V	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNEP	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan: a. Bahan Pendukung Manajemen Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigasan	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
	MG.03.06			V	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Besaran TKDN lelang b. Verifikasi Penilaian Besaran TKDN Proyek c. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kerja (SPPK) TKDN d. Laporan Verifikasi TKDN	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigasan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigasan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigasan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigasan	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
4.	MG.03.07			V	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri, antara lain: a. Surat Keterangan Kemampuan Produksi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigasan	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
	MG.03.08			V	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKBI) dan Rencana Impor Barang (RIB)	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan rencana impor barang	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
	MG.04		V		Pembinaan Usaha Hulu	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Hulu Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigasan	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
	MG.04.01			V	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja (WK) konvensional dan non konvensional, antara lain: a. Berkas Penyiapan, Penawaran, dan Permohonan Wilayah Kerja b. Penetapan Pemenang (Surat Keputusan Menteri)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigasan	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MG.04.02			V	Eksplorasi	<p>c. Dokumen Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi</p> <p>Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan layanan eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, antara lain:</p> <p>a. Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, dan Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri</p> <p>b. Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi</p> <p>c. Rekomendasi Pengalihan <i>Interest</i></p> <p>d. Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi</p> <p>e. Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak</p>	<p>Rahasia</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas</p>	<p>Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MG.04.04			V	Pengembangan lapangan (<i>Plan of Development/POD</i>)	d. Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
						e. Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018, Pasal 17, Memiliki dampak yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
						f. Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
						g. Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
	MG.04.05			V	Perpanjangan Kontrak Kerja Sama (KKS)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pengembangan lapangan atau Wilayah Kerja	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
						Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan perpanjangan Kontrak Kerja Sama (KKS), antara lain:				
						a. Dokumen Permohonan dan Persetujuan Perpanjangan Kontrak Kerja Sama (KKS)	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MG.04.06			V	Penetapan Alokasi dan Harga Gas	b. Surat Persetujuan Perpanjangan Kerja Sama (KKS) Dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c. Kontrak Perpanjangan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penetapan alokasi dan harga gas, antara lain: a. Evaluasi Permohonan Penetapan Harga Gas b. Surat Persetujuan Harga Gas oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Rahasia Rahasia Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
	MG.04.07			V	Partisipasi <i>Interest</i>	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan fasilitasi pelaksanaan Partisipasi <i>Interest</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
	MG.04.08			V	Tumpang Tindih Lahan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Penggunaan Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan selain Minyak dan Gas Bumi - Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan selain Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
5.	MG.05		V		Pembinaan Usaha Hilir	Naskah-naskah yang berkaitan dengan rumusan kebijakan pengembangan usaha, pengaturan, dan pembinaan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi				
	MG.05.01			V	Kebijakan Usaha Hilir	<p>Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain antara lain:</p> <p>a. Pedoman dan Prosedur</p> <p>b. Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan)</p> <p>c. pengawasan</p>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
	MG.05.02			V	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran	Naskah dinas yang berkaitan dengan fasilitasi perselisihan usaha, perlindungan konsumen, dan pertimbangan sanksi pelanggaran usaha hilir	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
	MG.05.03			V	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri	<p>Rekaman kegiatan, peristiwa, dan surat yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Berita Acara Rapat dan Notulen rapat</p>	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						i. Formula harga dan Subsidi Bahan Bakar j. Pengusulan Penetapan Harga Bahan Bakar k. Surat Keputusan Penetapan Harga Patokan Jenis BBM Tertentu l. Surat Keputusan Penetapan Harga Patokan LPG Tabung 3 Kilogram m. Surat Keputusan Penetapan Harga Jual BBM n. Surat Keputusan Penetapan Harga Jual LPG Tabung 3 Kilogram o. Surat Keputusan Penetapan Harga Indeks Pasar BBM	Rahasia Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
6.	MG.06 MG.06.01 MG.06.02		V	V	Teknik dan Lingkungan Standardisasi	p. Surat Keputusan Penetapan Harga Indeks Pasar LPG	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
						q. Surat Keputusan Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Nabati	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
						Rekaman kegiatan dan naskah dinas yang berkaitan dengan perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)/ Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
						Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
						a. Berkas permohonan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
						b. Berita Acara Hasil Evaluasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
c. Salinan Sertifikat NPT	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi						

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MG.06.03			V	Buku Register <i>Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)</i>	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Buku Register <i>Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/ Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
	MG.06.04			V	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/ Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
	MG.06.05			V	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Keselamatan Eksplorasi dan Produksi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/ Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
					a. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan		Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/ Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
					b. Pemeriksaan Kalibrasi Teknis		Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/ Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
					c. Pengawasan Keselamatan Operasi		Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/ Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MG.06.06			V	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi	<p>Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Keselamatan pemurnian dan pengolahan</p> <p>a. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan</p> <p>b. Pemeriksaan Kalibrasi Teknis dan Kalibrasi Alat Ukur</p> <p>c. Pengawasan Keselamatan Operasi</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigasan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigasan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigasan</p>	<p>Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi</p> <p>Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi</p> <p>Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi</p>
	MG.06.07			V	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan	<p>Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Ketechnikan dan lingkungan</p> <p>a. Monitoring Analisa Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) / Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)</p> <p>b. Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja Hilir</p> <p>c. Monitoring Terjadinya Pencemaran (CPL), tumpahan minyak</p> <p>d. Hasil Analisa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bahan Kimia</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigasan</p>	<p>Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi</p>
	MG.06.08			V	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir	<p>Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Permohonan Pengajuan dan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi</p> <p>a. Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigasan</p>	<p>Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	MG.06.09			V	Penghargaan Keselamatan Kerja	b. Surat Undangan Presentasi c. Makalah Presentasi d. Surat Persetujuan/Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pemberian penghargaan keselamatan kerja a. Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan b. Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi c. Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi d. Salinan Tanda Penghargaan	Terbatas Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigasan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigasan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigasan Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
7.	MG.06.10			V	Usaha penunjang	e. Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan usaha penunjang	Biasa/Terbuka Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
	MG.07		V		Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur	Naskah-naskah yang berkaitan dengan rumusan kebijakan pengembangan, perencanaan, pengadaan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi				
	MG.07.01			V	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan program kerja pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi a. LPG 3 Kg b. Jaringan gas (Jargas) untuk Rumah Tangga c. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) d. Konverterkit untuk transportasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	MG.07.02			V	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses pengadaan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi a. LPG 3 Kg b. Jargas untuk Rumah Tangga c. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) d. Konverterkit untuk transportasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	MG.07.03			V	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi a. LPG 3 Kg b. Jargas untuk Rumah Tangga	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemigas	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
IV 1.	MG.07.04			V	Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	c. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) d. Konverterkit untuk transportasi Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi a. LPG 3 Kg b. Jargas untuk Rumah Tangga c. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) d. Konverterkit untuk transportasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	TL TL.01 TL.01.01	V		V	KETENAGALISTRIKAN Kebijakan Pengusulan Kebijakan	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Pengusulan Kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketenagalistrikan	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
	TL.01.02			V	Penyiapan Kebijakan	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Penyiapan Kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketenagalistrikan	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
	TL.01.03			V	Perumusan Kebijakan	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Perumusan Kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketenagalistrikan	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
2.	TL.01.04 TL.02		V	V	Penetapan Kebijakan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kerja Sama	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Penetapan Kebijakan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Kerja Sama: a. Kerja Sama Nasional	Biasa/Terbuka Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketenagalistrikan	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
3.	TL.03 TL.03.01		V	V	Bina Program Tenaga Listrik Investasi dan pendanaan tenaga listrik	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Investasi dan pendanaan tenaga listrik: a. Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri b. Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik c. Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	TL.03.02			V	Pengembangan listrik pedesaan	d. Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik Rekaman Kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Data program listrik pedesaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
						a. Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
						b. Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
						d. Listrik untuk masyarakat tidak mampu	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
	TL.03.03			V	Data dan Informasi Ketenagalistrikan	Rekaman Kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Data ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
4.	TL.04 TL.04.01 TL.04.02		V	V	Bina Usaha Ketenagalistikan Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan Harga dan Subsidi Listrik	<p>Rekaman Kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (Izin Operasi (IO), Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPL-S), dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL))</p> <p>b. Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan</p> <p>c. Data laporan berkala pemegang Izin</p> <p>Rekaman Kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Dokumen monitoring dan verifikasi usulan dan persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin</p> <p>b. Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan harga jual tenaga listrik dari pembangkit milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik</p> <p>c. Dokumen evaluasi biaya bahan bakar dan pembayarannya pada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketenagalistrikan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketenagalistrikan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketenagalistrikan</p>	<p>Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan</p> <p>Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan dan fungsi Ketenagalistrikan</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	TL.04.04			V	Perlindungan konsumen listrik	b. laporan pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) c. Dokumen fasilitasi perselisihan hubungan komersial tenaga listrik d. Dokumen Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagalistrikan Rekaman Kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Penanganan pengaduan konsumen listrik 1. Data pengaduan konsumen listrik 2. koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan b. Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketenagalistrikan. Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
5.	TL.05 TL.05.01		V	V	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	<p>c. Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik</p> <p>d. Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)</p> <p>Rekaman Kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Dokumen kegagalan operasi instalasi tenaga listrik</p> <p>b. Dokumen inspeksi rutin Inspektur Ketenagalistrikan untuk kelaikan instalasi dan keselamatan ketenagalistrikan</p> <p>c. Dokumen forum komunikasi pembinaan inspektur ketenagalistrikan nasional</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketenagalistrikan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketenagalistrikan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketenagalistrikan</p>	<p>Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan</p> <p>Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan</p> <p>Direktorat Pembinaan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan</p> <p>Direktorat Pembinaan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan</p> <p>Direktorat Pembinaan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan</p>
	TL.05.02			V	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan	Rekaman Kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketenagalistrikan	Direktorat Pembinaan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	TL.06.03			V	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	Rekaman Kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketenagalistrikan	Direktorat Pembinaan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
	TL.06.04			V	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik	Rekaman Kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketenagalistrikan	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
	TL.06.05			V	Registrasi Sertifikasi	Rekaman Kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Dokumen registrasi sertifikat badan usaha	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketenagalistrikan	Direktorat Pembinaan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
7.	TL.07			V	Akreditasi Ketenagalistrikan					
	TL.07.01			V	Dokumen akreditasi ketenagalistrikan	Rekaman Kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Dokumen akreditasi ketenagalistrikan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi ketenagalistrikan	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
8.	TL.08			V	Standarisasi Kompetensi					
	TL.08.01			V	Dokumen standarisasi kompetensi	Rekaman Kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Dokumen penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
9.	TL.09			V	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan					
	TL.09.01			V	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	Rekaman Kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan:				

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	TL.09.02			V	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	a. Keputusan pembentukan panitia teknis b. Draft Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) 1 dan RSNI 2 c. Acuan normatif SNI (SNI, IES, SPLN, ISO, dll)	Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi ketenagalistrikan Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
	TL.09.03			V	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	Rekaman Kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan: a. Draft RSNI 3 b. Laporan penetapan hasil forum konsensus	Terbatas Biasa/Terbuka Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi ketenagalistrikan Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi ketenagalistrikan	Direktorat Pembinaan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
10.	TL.09.04			V	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	b. Peraturan Menteri terkait pemberlakuan SNI wajib Rekaman Kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan: a. Berkas pelaksanaan kegiatan b. Laporan pengawasan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Pembinaan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
	TL.10.01			V	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Rekaman Kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan Klsifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Pembinaan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
	TL.10.02			V	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Rekaman Kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Pembinaan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
	TL.10.03			V	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)	Rekaman Kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Dokumen permohonan penunjukan LIT	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi ketenagalistrikan	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
					V					

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER							
1	2	3			4	5	6	7	8	9	
IV 1.	TL.10.04	V	V	V	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT	Rekaman Kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan Laporan berkala pemegang penunjukan LIT	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi ketenagalistrikan	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
	TL.10.05			V	Laporan hasil pengawasan penunjukan	Rekaman Kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan Laporan hasil pengawasan penunjukan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi ketenagalistrikan	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
	EK			V	V	ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI (EBTKE) Kebijakan	masuk pada fungsi Hukum				
	EK.01.01			V	Pengusulan Kebijakan	Rekaman kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan Pengusulan Kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Sekretariat Direktorat Jenderal EBTKE	
	EK.01.02			V	Penyiapan Kebijakan	Rekaman kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan Penyiapan Kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Sekretariat Direktorat Jenderal EBTKE	
	EK.01.03			V	Perumusan Kebijakan	Rekaman kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan Perumusan Kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Sekretariat Direktorat Jenderal EBTKE	
EK.01.04	V	Penetapan Kebijakan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	Rekaman kegiatan, peristiwa, yang berkaitan dengan Penetapan Kebijakan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Sekretariat Direktorat Jenderal EBTKE				

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
2.	EK.02		V		Kerja Sama	Rekaman kegiatan, peristiwa yang berkaitan dengan Kerja Sama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Sekretariat Direktorat Jenderal EBTKE
3.	EK.03		V	V	Penyiapan Program	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan usulan wilayah kerja panas bumi meliputi:	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Panas Bumi
	EK.03.01				Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi	a. Usulan Penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Panas Bumi
						b. Usulan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Panas Bumi
						c. Usulan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Panas Bumi
	EK.03.02			V	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga, meliputi:	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan
						a. Proposal dan Dokumen Pendukung Usulan Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan
						b. Matriks Evaluasi Dokumen Usulan Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan
						c. Surat Tanggapan Usulan Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	EK.03.03			V	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Penyiapan Program Pemanfaatan Energi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Panas Bumi
	EK.03.04			V	Proyeksi Kebutuhan Energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Proyeksi Kebutuhan Energi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Konservasi
	EK.03.05			V	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Perencanaan Pemanfaatan Energi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Panas Bumi
	EK.03.06			V	Penyusunan Neraca Energi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Penyusunan Neraca Energi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Panas Bumi
	EK.03.07			V	Road Map di Bidang EBT	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Road Map bidang EBT, seperti: a. Dokumen Pendukung Proses Penyusunan Road Map b. Road Map	Terbatas Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Bio Energi Direktorat Bio Energi
4.	EK.04 EK.04.01		V	V	Panas Bumi Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Panas Bumi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	EK.04.02			V	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Panas Bumi
	EK.04.03			V	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan sertifikasi kelayakan penggunaan peralatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Panas Bumi
	EK.04.04			V	Rekomendasi Bahan Peledak	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan rekomendasi bahan peledak	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Panas Bumi
	EK.04.05			V	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan perizinan penggunaan gudang bahan peledak	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Panas Bumi
	EK.04.06			V	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Izin Tangki Bahan Bakar Cair	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Panas Bumi
	EK.04.07			V	Persetujuan sertifikasi <i>Welding Prosedure Specifikation (WPS)</i> dan <i>Prosedure Qualification Record (PQR)</i> dan kualifikasi Juru Las	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan sertifikasi <i>Welding Prosedure Specifikation (WPS)</i> dan <i>Prosedure Qualification Record (PQR)</i> dan kualifikasi Juru Las	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Panas Bumi
	EK.04.08			V	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Panas Bumi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	EK.04.14			V	Kerja Sama Panas Bumi	<p>Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Kerja Sama Panas Bumi yang meliputi:</p> <p>a. Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi</p> <p>b. <i>Government Drilling</i></p> <p>c. <i>Geothermal Resource Risk Mitigation Project (GREM)</i></p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE</p>	<p>Direktorat Panas Bumi</p> <p>Direktorat Panas Bumi</p> <p>Direktorat Panas Bumi</p>
	EK.04.15			V	Inventarisasi, Verifikasi, dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi	<p>Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi</p>	Biasa/Terbuka	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Panas Bumi
	EK.04.16			V	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi	<p>Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi</p>	Biasa/Terbuka	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Panas Bumi
	EK.04.17			V	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi	<p>Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi</p>	Terbatas	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Panas Bumi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
5	EK.05		V		Bioenergi					
	EK.05.01			V	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Bioenergi
	EK.05.02			V	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pengadaan BBN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Bioenergi
	EK.05.03			V	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penerbitan rekomendasi ekspor-impor	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Bioenergi
	EK.05.04			V	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	Rekaman kegiatan atau peristiwa surat yang berkaitan dengan: Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Bioenergi
	EK.05.05			V	Evaluasi/Revisi HIP BBN	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan: Evaluasi/Revisi HIP BBN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Bioenergi
	EK.05.06			V	Database Pengusahaan Bioenergi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Database Pengusahaan Bioenergi, seperti:	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Bioenergi
	EK.05.07			V	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Bioenergi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
6.	EK.05.08			V	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Bioenergi
	EK.05.09			V	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga, meliputi: a. Proposal dan Dokumen Pendukung Usulan Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga b. Matriks Evaluasi Dokumen Usulan Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga c. Surat Tanggapan Usulan Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Bioenergi
	EK.06		V		Aneka Energi					
	EK.06.01			V	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan
	EK.06.02			V	Penetapan Kapasitas Usaha	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penetapan kapasitas usaha meliputi: a. Surat Permohonan dan Dokumen Pendukung	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	EK.06.03			V	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	b. Laporan Hasil Evaluasi c. Surat Keputusan Penetapan Kapasitas Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, meliputi:	Terbatas Biasa/Terbuka Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan
	EK.06.04			V	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	a. Surat Permohonan dan Dokumen Pendukung b. Laporan Evaluasi c. Surat Rekomendasi/Penolakan Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan
	EK.06.05			V	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan persetujuan Rencana Impor Barang (RIB) meliputi:	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
7.	EK.07 EK.07.01		V	V	Konservasi Energi Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi	a. Surat Permohonan dan Dokumen Pendukung b. Laporan Hasil Evaluasi c. Surat Rekomendasi Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan audit energi melalui program kemitraan konservasi energi meliputi: a. Surat Penawaran Ikut Program Kemitraan b. Surat Pernyataan Komitmen c. Laporan Hasil Audit	Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Konservasi Energi Direktorat Konservasi Energi Direktorat Konservasi Energi
	EK.07.02			V	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan monitoring implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi, meliputi:	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Konservasi Energi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	EK.07.04			V	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast, meliputi:	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Direktorat Konservasi Energi
	EK.07.05			V	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Konservasi Energi
	EK.07.06			V	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan Penyusunan emisi energi gas rumah kaca, meliputi: a. Laporan Tahunan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca b. Laporan Tahunan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sekretariat Direktorat Jenderal EBTKE	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Konservasi Energi
	EK.07.07			V	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energy	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Konservasi Energi
	EK.07.08			V	Profil Investasi efisiensi energi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Profil Investasi efisiensi energi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Direktorat Konservasi Energi
	EK.07.09			V	<i>Investment Grade Audit</i> (IGA)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan <i>Investment Grade Audit</i> (IGA), meliputi: a. Daftar Obyek Potensial Peserta IGA	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Konservasi Energi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	EK.08.02			V	Penyusunan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur EBTKE	b. Matriks Evaluasi Dokumen Usulan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga c. Surat Tanggapan Usulan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyusunan program kerja, meliputi: a. Program Kerja Unit Kerja di Bidang EBTKE b. Program Kerja Prioritas Nasional Bidang EBTKE	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
	EK.08.03			V	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE, meliputi: a. Penyusunan <i>Feasibility Study/Detail Engineering Design/Basic Engineering Design</i> b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)	Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
	EK.08.04			V	Evaluasi Program Kerja Pembangunan Infrastruktur EBTKE	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan evaluasi program kerja, meliputi: a. Program Kerja Unit Kerja di Bidang EBTKE	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
V 1.	PB PB.01 PB.01.01 PB.01.02 PB.01.03 PB.01.04	V	V	V	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Kebijakan Pengusulan Kebijakan	b. Program Kerja Prioritas Nasional Bidang EBTKE Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Pengusulan Kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi EBTKE	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
							Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan	Sekretariat Badan Litbang ESDM
							Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan	Sekretariat Badan Litbang ESDM
							Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan	Sekretariat Badan Litbang ESDM
2	PB.02	V	V	Kerja Sama	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Penetapan Kebijakan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Kerja Sama: a Kerja Sama yang bersifat jangka pendek/tahunan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Sekretariat Badan Litbang ESDM	
						Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan	Sekretariat Badan Litbang ESDM	

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
3	PB.03 PB.03.01		V	V	Program Rencana Penelitian dan Pengembangan	<p>b Kerja Sama yang bersifat multi years</p> <p>Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Master Plan/Rencana Strategis Penelitian dan Pengembangan</p> <p>b. Rencana kerja Tahunan Penelitian dan Pengembangan/ Proposal/ <i>Idea Concept Paper</i> (ICP)</p> <p>c. Bekas/Kontrak MoU Kerja sama/<i>Material Transfer Agreement</i> (MTA)</p> <p>d. Perijinan Penelitian</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p>	<p>Sekretariat Badan Litbang ESDM</p> <p>Pusat di lingkungan Badan Litbang</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	PB.03.04			V	Pengembangan dan Inovasi	e. Pelaksanaan Survey f. Laporan Hasil Pendataan/Survey g. Analisis/Pengolahan Data Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Rencana Kerja b. Administrasi Pengembangan dan Inovasi c. Pelaksanaan	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan	Pusat di lingkungan Badan Litbang Pusat di lingkungan Badan Litbang Pusat di lingkungan Badan Litbang Pusat di lingkungan Badan Litbang Pusat di lingkungan Badan Litbang

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
4.	PB.03.05			V	Advokasi dan Fasilitasi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	d. Hasil Pengembangan Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Advokasi dan Fasilitasi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan	Pusat di lingkungan Badan Litbang
	PB.04.01		V	V	Sarana Penelitian dan Pengembangan Litbang Administrasi penggunaan peralatan	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Administrasi penggunaan peralatan penelitian	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan	Pusat di lingkungan Badan Litbang
	PB.04.02			V	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi	Rekaman kegiatan dan peristiwa, yang berkaitan dengan Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Pusat di lingkungan Badan Litbang
	PB.05.01		V	V	Afiliasi Proyek Percontohan	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Proyek Percontohan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan	Badan Litbang ESDM
5.	PB.05.01			V	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Promosi dan Pelayanan Layanan Jasa Teknologi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Pusat di lingkungan Badan Litbang
	PB.05.02			V	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	Rekaman kegiatan dan peristiwa, yang berkaitan dengan Promosi dan Pelayanan Layanan Jasa Teknologi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Pusat di lingkungan Badan Litbang

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	PB.05.03			V	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Hak atas kekayaan intelektual 1. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum 2. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum 3. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum b. Kemitraan Intelektual Penelitian dan Pengembangan c. Bimbingan Teknis Kelitbang d. Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Pusat di lingkungan Badan Litbang
	PB.05.04			V	Penyajian Informasi	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Sosialisasi/Desiminasi secara manual/Elektronik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Pusat di lingkungan Badan Litbang

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	PB.05.05			V	Layanan Jasa Penelitian	Rekam kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Jasa Laboratorium Penelitian b. Jasa Teknologi Industri c. Jasa Studi d. Jasa Penyewaan Peralatan e. Jasa Pembantuan Tenaga Ahli/Profesi	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan	Pusat di lingkungan Badan Litbang Pusat di lingkungan Badan Litbang Pusat di lingkungan Badan Litbang Pusat di lingkungan Badan Litbang Pusat di lingkungan Badan Litbang

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
6.	PB.06 PB.06.01		V	V	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan	f. Jasa Sertifikasi/Kalibrasi dan Sertifikasi g. Buku Rekaman Barang yang diuji/diklaribrasi Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Peta Betimetri b. Peta Gravity c. Peta Maget	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan	Pusat di lingkungan Badan Litbang Pusat di lingkungan Badan Litbang Puslitbang Geologi Kelautan Puslitbang Geologi Kelautan Puslitbang Geologi Kelautan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	PB.06.02			V	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai	d. Peta Sebaran Sedimen e. Atlas Seismik f. Pemetaan Batas Landas kontinen Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Peta Potensi Energi dan kewilayahan b. Peta Zona Wilayah	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan	Puslitbang Geologi Kelautan Puslitbang Geologi Kelautan Puslitbang Geologi Kelautan Puslitbang Geologi Kelautan Puslitbang Geologi Kelautan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	PB.06.04			V	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan	<p>d. Peta Potensi biogenik Gas Pantai dan lepas pantai</p> <p>Rekaman kegiatan dan peristiwa, yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Peta Sebaran Sedimen dasar laut</p> <p>b. Peta sebaran potensi sumber daya mineral kelautan</p> <p>c. Peta Sebaran Agregat Pasir Laut</p> <p>d. Peta kandungan mineral jarang kelautan (Unsur Tanah Jarang/Rare Earth Elements (REE))</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p>	<p>Puslitbang Geologi Kelautan</p> <p>Puslitbang Geologi Kelautan</p> <p>Puslitbang Geologi Kelautan</p> <p>Puslitbang Geologi Kelautan</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	PB.07.04			V	Teknologi Aplikasi Produk	<p>3. Laboratorium Preparasi dan karakteristik katalis</p> <p>4. Laboratorium Biodiesel dan Pengembalian Proses</p> <p>5. Laboratorium Pemodelan</p> <p>b. Teknologi Lingkungan, Kimia, dan Bioteknologi</p> <p>1. Laboratorium Kromatografi</p> <p>2. Laboratorium Kimia Umum dan Limbah</p> <p>3. Laboratorium Spektroskopi</p> <p>4. Laboratorium Lingkungan</p> <p>5. Laboratorium Mikrobiologi dan Bioproses</p> <p>Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Bahan Bakar dan Aviasi</p> <p>1. Laboratorium Karakteristik bahan bakar</p> <p>2. Laboratorium Unjuk kerja bahan bakar</p> <p>b. Pelumas</p> <p>1. Laboratorium Karakteristik Pelumas</p> <p>2. Laboratorium unjuk kerja Pelumas</p> <p>3. Laboratorium minyak Rem</p> <p>c. Lube Oil Blending Plant (LOBP)</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p>	<p>Puslitbangtek Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	PB.07.05			V	Teknologi Gas	<p>d. Laboratorium Operasi LOBP</p> <p>Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Teknologi Pemurnian dan analisis Gas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Komposisi gas <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Uji (LHU) dan Row Data Analisis - Data Verifikasi Alat - Laporan Studi Hasil Pekerjaan 2. Laboratorium Sifat Kimia/Fisika Gas <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Uji (LHU) dan Row Data Analisis - Data Verifikasi Alat - Laporan Studi Hasil Pekerjaan 3. Laboratorium Hidrat <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Uji (LHU) dan Row Data Analisis - Data Verifikasi Alat - Laporan Studi Hasil Pekerjaan <p>b. Teknologi Infrastruktur dan Pemanfaatan Gas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Uji Material <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Uji (LHU) dan Row Data Analisis - Data Verifikasi Alat - Laporan Studi Hasil Pekerjaan 2. Laboratorium Komposisi Korosi <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Uji (LHU) dan Row Data Analisis - Data Verifikasi Alat - Laporan Studi Hasil Pekerjaan 	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p>	<p>Puslitbangtek Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"</p> <p>Puslitbangtek Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"</p> <p>Puslitbangtek Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	PB 08.02			V	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Pengolahan dan pemanfaatan mineral	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan	Puslitbangtek Mineral dan Batubara
						b. Laboratorium Pengolahan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan	Puslitbangtek Mineral dan Batubara
						c. Laboratorium Metalurgi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan	Puslitbangtek Mineral dan Batubara
	PB 08.03			V	Teknologi Pemanfaatan Batubara	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan: a. Pengolahan dan pemanfaatan Batubara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan	Puslitbangtek Mineral dan Batubara
						b. Laboratorium Penelitian Pengolahan Batubara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan	Puslitbangtek Mineral dan Batubara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
9	PB.09		V		Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	<p>Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Model Pengembangan Biofuel</p> <p>b. Survei dan Pra-Feasibility Study Potensi Panas bumi, Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Mikro Hidro, Angin, dan Surya di daerah terpilih</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p>	<p>Puslitbangtek Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi</p> <p>Puslitbangtek Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi</p>
	PB.09.01			V						
	PB.09.02			V	Teknologi Ketenagalistrikan	<p>Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Pengembangan Teknologi <i>Smart Grid</i></p> <p>b. Kerja sama pengembangan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)</p> <p>c. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Nuklir, Atom, Titanium</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan</p>	<p>Puslitbangtek Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi</p> <p>Puslitbangtek Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi</p> <p>Puslitbangtek Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	PB.09.03			V	Lingkungan dan Konservasi Energi	Rekaman kegiatan dan peristiwa, yang berkaitan dengan: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Konservasi Energi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan	Puslitbangtek Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi
	PB.10		V		Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan					
	PB.10.01			V	Dokumen Penerapan/Pemanfaatan/ Pendayagunaan/Replikasi/Prototipe Hasil Penelitian/Pengkajian dan/Pengembangan/Inovasi	Rekaman kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan Penerapan/Pemanfaatan/Pendayagunaan/Replikasi/Prototipe Hasil Penelitian/Pengkajian dan/Pengembangan/Inovasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan	Badan Litbang ESDM

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEBALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 167.K/04/MEM/2020

TANGGAL : 8 September 2020

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES

ARSIP KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP

BERDASARKAN FUNGSI FASILITATIF

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I 1.	PR PR.01 PR.01.01	√	√	√	Perencanaan Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan RPJP, seperti: a. Proses kegiatan penyusunan b. Penetapan	Terbatas Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani perencanaan Unit yang menangani perencanaan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
2.	PR.01.02			√	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan RPJM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani perencanaan
	PR.01.03			√	Rencana Strategis (Renstra)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Renstra	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani perencanaan
	PR.01.04			√	Rencana Kerja Tahunan KESDM	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Rencana Kerja Tahunan KESDM, seperti: a. Usulan Rencana Kerja Pemerintah b. Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah c. Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja-KL) d. Rencana Kerja Tahunan e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) f. Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani perencanaan
	PR.01.05			√	Nota Keuangan dan Lampiran Pidato Presiden	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan nota keuangan dan lampiran pidato presiden	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani perencanaan
	PR.02		√		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran					
	PR.02.01			√	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KESDM	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja anggaran KESDM, seperti: a. Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) KESDM b. Dokumen Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak c. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani perencanaan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	PR.02.02			√	Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran KESDM kepada DPR RI	d. Dokumen Rencana Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP) e. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Pagu Indikatif f. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Sementara g. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Pagu Definitif h. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) j. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) k. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) l. Usulan Standar Biaya Khusus, Usulan Standar Biaya Masukan, dan Biaya Keluaran	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani perencanaan
3.	PR.03 PR.03.01		√	√	Perjanjian Kinerja Penetapan Perjanjian Kinerja	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Penetapan Perjanjian Kinerja, meliputi: a. Menteri b. Pimpinan Unit Organisasi c. Pimpinan Unit	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani perencanaan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
4.	PR.04		√		Kegiatan Sidang					
	PR.04.01			√	Sidang Kabinet	Rekaman kegiatan, peristiwa, dan surat yang berkaitan dengan materi/bahan untuk kegiatan sidang kabinet, hasil sidang kabinet, dan laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani perencanaan
	PR.04.02			√	Rapat Terbatas	Rekaman kegiatan, peristiwa, dan surat yang berkaitan dengan materi/bahan untuk kegiatan rapat terbatas, hasil rapat terbatas, dan laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas KESDM	Unit yang menangani perencanaan
5.	PR.05		√		Rapat/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Pimpinan					
	PR.05.01			√	Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Rekaman kegiatan, peristiwa, dan surat yang berkaitan dengan rapat DPR seperti undangan, materi/bahan, notulen/hasil, putusan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani perencanaan
	PR.05.02			√	Rakor Tingkat Menteri	Rekaman kegiatan, peristiwa, dan surat yang berkaitan dengan rapat koordinasi tingkat menteri seperti undangan, materi/bahan, notulen/hasil, putusan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani perencanaan
	PR.05.03			√	Rapat Pimpinan	Rekaman kegiatan, peristiwa, dan surat yang berkaitan dengan rapat pimpinan seperti undangan, materi/bahan, daftar hadir, notulen/hasil	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani perencanaan
6.	PR.06		√		Pelaporan dan Evaluasi					
	PR.06.01			√	Laporan Berkala	Laporan Berkala a. Laporan Triwulan b. Laporan Tahunan Unit Kerja c. Laporan Tahunan KESDM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani perencanaan
	PR.06.02			√	Laporan Khusus Bidang ESDM	Rekaman kegiatan, peristiwa, dan surat yang berkaitan dengan Laporan Khusus Bidang ESDM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani perencanaan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
II 1.	PR.06.03			√	<i>Progress Report</i>	Rekaman kegiatan, peristiwa, dan surat yang berkaitan dengan <i>Progress Report</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani perencanaan
	PR.06.04			√	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Rekaman kegiatan, peristiwa, dan surat yang berkaitan dengan LAKIP	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani perencanaan
	PR.06.05			√	Evaluasi Program	Rekaman kegiatan, peristiwa, dan surat yang berkaitan dengan Evaluasi Program	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani perencanaan
	KU	√			Keuangan					
	KU.01		√		Tata Kelola Keuangan					
	KU.01.01			√	Ketentuan/Peraturan Menteri Keuangan menyangkut pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Ketentuan/Peraturan Menteri Keuangan menyangkut pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi serta pertanggungjawaban anggaran	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KU.01.02			√	Pedoman/Kebijakan terkait Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pedoman/Kebijakan terkait Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani keuangan
KU.01.03			√	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak, seperti: a. Bukti Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak b. Dokumen Sewa Pemanfaatan Asset/Barang Milik Negara c. Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari masing-masing satuan kerja d. Target dan pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak e. Usulan Penyaluran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan	

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
2.	KU.01.04			√	Pinjaman/Hibah Langsung Luar Negeri Barang/Jasa	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan pinjaman/hibah langsung luar negeri barang/jasa meliputi laporan dan hasil pemantauan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KU.01.05			√	Piutang Negara	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan piutang negara seperti: a. Dokumen Piutang Negara b. Dokumen Pengelolaan Investasi Penyertaan Modal Negara dan sejenisnya c. Penghapusan Piutang Negara meliputi persiapan, proses, dan pelaksanaan sampai usulan penghapusan piutang	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KU.02		√		Pelaksanaan Anggaran					
	KU.02.01				Belanja Pegawai	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan belanja pegawai meliputi gaji, tunjangan termasuk tunjangan kinerja dan remunerasi, honorarium, uang lembur, uang makan, pensiun, biaya kecelakaan, biaya pemakaman, penggajian pegawai honorer, dan vakasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KU.02.02				Belanja Barang	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan belanja barang meliputi belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) dan belanja bantuan sosial	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KU.02.03				Belanja Modal	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan belanja modal meliputi pembayaran perolehan aset dan atau menambah nilai aset tetap atau aset lainnya	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan
KU.02.04				Pengeluaran Anggaran	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran meliputi Rencana Penarikan Dana (RPD), Rencana Pelaksana Kegiatan (RPK), Surat Permintaan Pembayaran (SPP-GU (Ganti Uang), SPP-LS (Langsung), SPP-UP (Uang Persediaan), SSP-TUP (Tambah Uang Persediaan), Surat Kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Pengesahan Pendapatan (SP3), petunjuk pelaksanaan/mekanisme pengelolaan APBN dan bahan nota keuangan.	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan	

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
3.	KU.02.05			√	Revisi Anggaran	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Revisi Anggaran, seperti: a. Revisi DIPA b. Revisi POK	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KU.03		√		Pengelolaan Perbendaharaan					
	KU.03.01			√	Perbendaharaan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan perbendaharaan meliputi persiapan usulan persetujuan dan pelaporan pembukaan dan penutupan rekening, surat keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kuasa Pengguna Barang/Jasa (KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji, penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, dan bendahara penerimaan, Pejabat Pembuat Daftar Gaji, Pengelola Barang serta Berita Acara Serah Terima Jabatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KU.03.02			√	Pajak	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan meliputi penerimaan dan Surat Setoran Pajak (SSP)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KU.03.03			√	Pengembalian Belanja	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan pengembalian belanja meliputi pengembalian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KU.03.04			√	Dokumen Tata Usaha Anggaran	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Dokumen Tata Usaha Anggaran seperti: a. Buku Kas Umum (BKU) b. Buku Kas Pembantu (BKP) c. Buku/Kartu Pengawas Kredit Anggaran d. Rekening Koran Bank e. Berita Acara Pemeriksaan Kas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan
KU.03.05			√	Verifikasi Anggaran	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan verifikasi anggaran meliputi pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/ pengeluaran anggaran	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan	

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
4.	KU.03.06				Dokumen Realisasi Pencairan Dana	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan Dokumen Realisasi Pencairan Dana	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KU.03.07				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KU.04		√		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					
	KU.04.01			√	Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan dan pengelolaan barang milik negara
	KU.04.02			√	Laporan TEPR (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan Laporan TEPR (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KU.04.03			√	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja/ UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada satuan kerja/ UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang) meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan
KU.04.04			√	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada UPT meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan	

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
5.	KU.04.05			√	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Unit Eselon I/UAPPA E1 (Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I) (Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Direktorat Jenderal/ Sekretariat Inspektur Jenderal/ Sekretariat Badan/Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa/ Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit eselon I /UAPPA E1 (Sekretariat Jenderal/Sekretariat Direktorat Jenderal/ Sekretariat Inspektur Jenderal/ Sekretariat BadanBadan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa/ Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional) meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/ Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KU.04.06			√	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada KESDM/ UAPA (Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada KESDM meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/ Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KU.04.07			√	Penyiapan Bahan Analisis/ Telaah Akuntansi Kementerian	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan analisis/ telaah akuntansi kementerian	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/ Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KU.05		√		Ketatausahaan Keuangan					
	KU.05.01			√	Keterangan Penghasilan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Keterangan Penghasilan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/ Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KU.05.02			√	Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/ Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KU.05.03			√	Permohonan Pinjaman	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Permohonan Pinjaman	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/ Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
III 1. 2.	KU.05.04			√	Iuran Keanggotaan Organisasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Iuran Keanggotaan Organisasi seperti Bukti Setor Iuran/Kontribusi Pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KU.05.05			√	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani keuangan
	KP	√			Kepegawaian					
	KP.01		√		Pedoman Kepegawaian					
	KP.01.01			√	Pendelegasian Wewenang	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas (Plt.), Pelaksana Harian (Plh.), atas nama (a.n.), dan untuk beliau (u.b.)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.02			√	Perencanaan Pegawai					
	KP.02.01			√	Penyusunan rencana kebutuhan pegawai (ASN dan Non ASN)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan pegawai, pertimbangan formasi, penetapan kebutuhan pegawai, dan standardisasi jabatan, informasi jabatan, kompetensi jabatan, dan klasifikasi jabatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian
KP.02.02			√	Formasi Pegawai (ASN dan Non ASN)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan formasi, antara lain: a. Usulan dari Unit Kerja antara lain berupa analisis jabatan dan analisis beban kerja b. Bezzeting Pegawai (ASN dan Non ASN)	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian Unit yang menangani kepegawaian	

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER							
3.	KP.03 KP.03.01		√		Pengadaan Pegawai Seleksi/Penerimaan Pegawai	c. Usulan Permintaan Formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) termasuk Usul Formasi Calon Aparatur Negeri Sipil (CASN) dan Calon Non ASN, Usul Formasi Kenaikan Jenjang, Alih Jabatan dan Redistribusi, Usul Formasi Jabatan Fungsional Binaan Kementerian lain	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani kepegawaian	
						d. Surat Persetujuan Menpan dan RB/Surat Keputusan Penetapan Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian	
						e. Penetapan Formasi Khusus (PPPK/prohire)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian	
						f. Dokumen analisis jabatan dan beban kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian	
						g. Dokumen formasi jabatan dan penetapan kebutuhan pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian	
						h. Dokumen Validasi Usul Formasi Jabatan Fungsional Binaan KESDM dari Instansi Pusat dan Daerah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak pada privasi seseorang	Unit yang menangani kepegawaian	
						Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan proses seleksi/penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KESDM, seperti:					
						√					

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
						a. Keputusan Tim/Panitia Penerimaan Pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian
						b. Pengumuman	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian
						c. Surat lamaran	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian
						d. Pemanggilan peserta tes	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian
						e. Daftar peserta ujian	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian
						f. Hasil wawancara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani kepegawaian
						g. Keputusan hasil ujian	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani kepegawaian
						h. Keputusan pengumuman kelulusan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	KP.03.02			√	Pengangkatan ASN/Non ASN	i. Surat Lamaran yang Tidak Lulus Seleksi Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan proses pengangkatan CPNS sampai ke PNS, seperti: a. Nota usul dan kelengkapan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) meliputi Surat Lamaran, Ijazah, SKCK, Kartu Kuning dan Surat Keterangan Kesehatan b. Nota usul pengangkatan CASN menjadi ASN c. SK CASN/ASN/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kolektif d. SK CASN/ASN/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) e. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) f. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM Memiliki dampak terhadap privasi seseorang Memiliki dampak terhadap privasi seseorang Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM Memiliki dampak terhadap privasi seseorang Memiliki dampak terhadap privasi seseorang	Unit yang menangani kepegawaian Unit yang menangani kepegawaian
	KP.03.03			√	Prajabatan/Latihan Dasar	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Prajabatan/Latihan Dasar	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.03.04			√	Penempatan ASN/Non ASN	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penempatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani kepegawaian

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
4.	KP.03.05			√	Seleksi Terbuka Jabatan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan seleksi terbuka jabatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.04		√		Pengembangan Karir Pegawai					
	KP.04.01			√	Pola Karir	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyusunan rencana pola karir pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap seseorang	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.04.02			√	Assesment	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan assesment, meliputi: a. Tugas belajar b. Jabatan	Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap seseorang Memiliki dampak terhadap seseorang	Unit yang menangani kepegawaian Unit yang menangani kepegawaian
	KP.04.03			√	Tugas Belajar/Izin Belajar/Ujian Dinas	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pengembangan Tugas Belajar/Izin Belajar/Ujian Dinas pegawai, seperti: a. Surat edaran/pengumuman, surat usulan studi pegawai, laporan hasil tes masuk perguruan tinggi berkenaan dengan studi lanjut b. Ikatan kerja dan surat perjanjian izin/tugas belajar, surat perintah/tugas belajar/Surat Keputusan/surat izin, surat-surat sponsor, laporan perkembangan studi, permohonan perpanjangan studi, ijazah, akreditasi program studi, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL), dan sertifikat c. surat penawaran, surat usulan pegawai, dan sertifikat pendidikan	Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian Unit yang menangani kepegawaian Unit yang menangani kepegawaian

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
5.	KP.04.04			√	Penyesuaian Ijazah	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyesuaian ijazah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.05		√		Mutasi Pegawai					
	KP.05.01			√	Kenaikan Pangkat/ Golongan/Jabatan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan usulan sampai penetapan kenaikan pangkat/golongan/ jabatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap seseorang privasi	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.05.02			√	Pemindahan, diperbantukan, dan dipekerjakan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan alih status, pindah pegawai, diperbantukan, dipekerjakan, penugasan sementara, pindah sementara, mutasi antar unit, seperti: a. Surat Permohonan b. Surat Persetujuan c. Nota Persetujuan/ Pertimbangan BKN d. Keputusan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap seseorang privasi	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.05.03			√	Baperjakat	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan usulan sampai dengan hasil baperjakat	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap seseorang privasi	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.05.04			√	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional/ Lainnya	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan usulan sampai penetapan pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural/fungsional/ lainnya	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap seseorang privasi	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.05.05			√	Pemberhentian Pegawai	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pemberian pensiun, pemberhentian tanpa hak pensiun, wafat, dan tewas/meninggal dalam tugas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap seseorang privasi	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.05.06			√	Penyesuaian Masa Kerja	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyesuaian masa kerja	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap seseorang privasi	Unit yang menangani kepegawaian
KP.05.07			√	Ujian Kenaikan Pangkat/Jabatan/Golongan/ Struktural dan Fungsional	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan ujian kenaikan pangkat/jabatan, seperti: a. Ujian Penyesuaian Ijazah b. Ujian Dinas	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian	

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN		UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER							
6.	KP.05.08			√	Usul Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/ Fungsional	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Usul Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki terhadap seseorang	dampak privasi	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.05.09			√	Inpassing atau Mutasi Jabatan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Inpassing atau Mutasi Jabatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki terhadap seseorang	dampak privasi	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.05.10			√	Pelantikan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pelantikan meliputi Berita Acara Pelantikan, Serah Terima Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), Surat Pernyataan Pelantikan (SPP)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki terhadap seseorang	dampak privasi	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.05.11			√	Mutasi Keluarga	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Mutasi Keluarga meliputi Surat Izin Pernikahan/Perceraian, Surat Izin Penolakan Pernikahan/Perceraian, Akte Nikah/Cerai, Akte Kelahiran Anak, Surat Keterangan Meninggal Dunia	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki terhadap seseorang	dampak privasi	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.05.12			√	Pendaftaran Keluarga/Perkawinan/Anak	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pendaftaran Keluarga/Perkawinan/Anak	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki terhadap seseorang	dampak privasi	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.05.13			√	Usul Perubahan Penetapan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Usul Perubahan Penetapan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki terhadap seseorang	dampak privasi	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.06		√		Penilaian Kinerja, Disiplin, dan Penghargaan Pegawai						
	KP.06.01			√	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyusunan SKP dan penilaian prestasi kerja	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki terhadap seseorang	dampak privasi	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.06.02			√	Disiplin Pegawai	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan disiplin pegawai antara lain tata tertib pegawai, daftar hadir pegawai, catatan pelanggaran disiplin pegawai, dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki terhadap seseorang	dampak privasi	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.06.03			√	Sanksi/Hukuman	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan sanksi/hukuman yang diberikan kepada pegawai yang melanggar peraturan atau tidak mematuhi tata tertib pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki terhadap seseorang	dampak privasi	Unit yang menangani kepegawaian

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
7.	KP.06.04			√	Penghargaan Pegawai	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan penghargaan pegawai seperti tanda kehormatan Satyalancana karya Satya (10, 20, atau 30 tahun) dan penghargaan lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.06.05			√	Budaya Kerja atau Pembinaan Mental Pegawai	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Budaya Kerja atau Pembinaan Mental Pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.07		√		Kesejahteraan Pegawai					
	KP.07.01			√	Penghasilan Pegawai	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penghasilan pegawai mulai dari perencanaan, penetapan, kenaikan berkala, dan laporan kegiatannya, seperti: a. Surat permohonan kenaikan gaji berkala b. Berkas penetapan gaji berkala c. Laporan pertanggungjawaban realisasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap privasi seseorang	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.07.02			√	Penyesuaian Tunjangan Keluarga	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Penyesuaian Tunjangan Keluarga	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap privasi seseorang	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.07.03			√	Penyesuaian Tunjangan Fungsional	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Penyesuaian Tunjangan Fungsional	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap privasi seseorang	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.07.04			√	Cuti	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan cuti seperti: a. Cuti besar b. Cuti sakit c. Cuti bersalin d. Cuti tahunan e. Cuti alasan penting f. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap privasi seseorang	Unit yang menangani kepegawaian
KP.07.05			√	Tabungan Pensiun (Taspen)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Taspen	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap privasi seseorang	Unit yang menangani kepegawaian	

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	KP.07.06			√	Kesehatan Pegawai/ Asuransi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kesehatan pegawai/asuransi				
						a. Asuransi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap privasi seseorang	Unit yang menangani kepegawaian dan umum
						b. Rekam Medis Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap privasi seseorang	Unit yang menangani kepegawaian dan umum
	KP.07.07			√	Rekreasi/Kesenian/Olahraga	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Rekreasi/Kesenian/Olahraga	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.07.08			√	Bantuan Sosial	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan bantuan sosial	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.07.09			√	Perumahan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penawaran perumahan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian
	KP.07.10			√	Pakaian Dinas	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan aturan dan/atau pengadaan Pakaian Dinas	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian
8.	KP.08			√	Sistem Informasi Kepegawaian					
	KP.08.01			√	Pengelolaan data dan informasi kepegawaian	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi kepegawaian, seperti:				

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH													
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER																			
9.	KP.08.02			√	Data Kekuatan Pegawai	a. Pengolahan Data meliputi : - Pengolahan Data Base Kepegawaian ASN - Penyelesaian Permasalahan Data Kepegawaian ASN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap privasi seseorang	Unit yang menangani kepegawaian													
						b. Informasi Kepegawaian meliputi : - Penyajian informasi dan penyusunan table referensi kepegawaian ASN - Penyajian informasi dan penyusunan table referensi kepegawaian non ASN - Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap privasi seseorang	Unit yang menangani kepegawaian													
						Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Data Kekuatan pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian													
						Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Data dan Informasi Pribadi Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap privasi seseorang	Unit yang menangani kepegawaian													
						Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pengembangan sistem informasi kepegawaian	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian													
	KP.09					√	Pembinaan Jabatan Fungsional	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian meliputi arsip kepegawaian baik konvensional dan elektronik : a. verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian b. perekaman arsip kepegawaian c. pengelolaan arsip kepegawaian elektronik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap privasi seseorang	Unit yang menangani kepegawaian										
														Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pembinaan Jabatan Fungsional termasuk penetapan angka kredit, sosialisasi, internalisasi	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepegawaian						
														Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi				Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap privasi seseorang	Unit yang menangani kepegawaian			
														Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pengembangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan							Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap privasi seseorang	Unit yang menangani kepegawaian
														Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian									
Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Data dan Informasi Pribadi Pegawai	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap privasi seseorang	Unit yang menangani kepegawaian																				

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	KP.09.03			√	Jabatan Fungsional Inspektur Tambang	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang				
	KP.09.04			√	Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api				
	KP.09.05			√	Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi				
	KP.09.06			√	Jabatan Fungsional Arsiparis	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis				
	KP.09.07			√	Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian				
	KP.09.08			√	Jabatan Fungsional Widyaiswara	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Widyaiswara				
	KP.09.09			√	Jabatan Fungsional Peneliti	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti				
	KP.09.10			√	Jabatan Fungsional Perencana	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana				
	KP.09.11			√	Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan				
	KP.09.12			√	Jabatan Fungsional Auditor	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Auditor				
	KP.09.13			√	Jabatan Fungsional Pustakawan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Pustakawan				
	KP.09.14			√	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer				
	KP.09.15			√	Jabatan Fungsional Pranata Humas	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas				

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	KP.09.16			√	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan				
	KP.09.17			√	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa				
	KP.09.18			√	Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang				
	KP.09.19			√	Jabatan Fungsional Analis Keuangan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan				
	KP.09.20			√	Jabatan Fungsional Perekayasa	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Perekayasa				
	KP.09.21			√	Jabatan Fungsional Bidan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Bidan				
	KP.09.22			√	Jabatan Fungsional Dokter	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Dokter				
	KP.09.23			√	Jabatan Fungsional Dokter Gigi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Dokter Gigi				
	KP.09.24			√	Jabatan Fungsional Instruktur	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Instruktur				
	KP.09.25			√	Jabatan Fungsional Asisten Ahli	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Ahli				
	KP.09.26			√	Jabatan Fungsional Penerjemah	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah				
	KP.09.27			√	Jabatan Fungsional Perawat Gigi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pembinaan Jabatan Fungsional Perawat Gigi				
	KP.09.28			√	Jabatan Fungsional Perawat	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pembinaan Jabatan Fungsional Perawat				

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
10.	KP.09.29			√	Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan				
	KP.09.30			√	Jabatan Fungsional Surveyor	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pembinaan Jabatan Fungsional Surveyor				
	KP.09.31			√	Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa				
	KP.09.32			√	Jabatan Fungsional Lainnya	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pembinaan Jabatan Fungsional Lainnya				
	KP.10		√		Berkas Perseorangan ASN	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Berkas Perseorangan Aparatur Negeri Sipil meliputi : a. Lamaran yang diterima b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN d. SK Penangkatan CASN/Calon Non ASN e. SK Pengangkatan ASN/Non ASN f. SK Kenaikan Pangkat g. SK Peninjauan Masa Kerja h. SK Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional i. SK Perpindahan Unit Kerja/Satuan Kerja j. SK Perpindahan antar Instansi k. SK Cuti diluar Tanggungan Negara (CTLN) l. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin m. SK Diperbantukan/Diperkerjakan diluar Instansi n. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan o. SK Pemberian Uang Tunggu p. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena Diangkat sebagai Pejabat Negara q. SK Pengalihan ASN r. SK Penempatan/Penarikan Pegawai s. SK Penggantian Nama t. SK Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan u. Surat Perbaikan Tanggal/Tahun Kelahiran v. Daftar Riwayat Hidup w. Akta Nikah/Cerai/Lahir x. Surat Keterangan Mutasi y. Berita Acara Pengabdian Sumpah/Janji ASN dan Jabatan z. Berita Acara Pemeriksaan aa. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional bb. Surat Tugas/Ijin Belajar Dalam/Luar Negeri	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap privasi seseorang	Unit yang menangani kepegawaian

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN		UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER							
11.	KP.11		√		Berkas Perseorangan Pejabat Negara	cc. Surat Ijin Berpergian ke Luar Negeri dd. Ijazah/Sertifikat ee. Surat Permohonan menjadi Anggota Parpol ff. Surat Pertimbangan Status ASN gg. SK Pemberhentian sebagai ASN hh. Pemberhentian Sementara ii. SK Pengaktifan Kembali sebagai ASN jj. SK Pensiun (BUP), Janda/Duda kk. Hasil Pengujian Kesehatan ll. SK Perpindahan Satuan Kerja mm. SK Pengangkatan pada Jabatan diluar Instansi Induk nn. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah oo. Surat Keterangan Pernyataan Hilang pp. Surat Keterangan Meninggal Dunia	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap seseorang	privasi	Unit yang menangani kepegawaian
12.	KP.12		√		Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan berkas perseorangan Wakil Menteri, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Pejabat KESDM yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri ESDM/Keputusan Presiden a. Wakil Menteri dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya b. Staf Khusus Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional c. ASN yang berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap seseorang	privasi	Unit yang menangani kepegawaian
13.	KP.13		√		Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang Tewas	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang Tewas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak terhadap seseorang	privasi	Unit yang menangani kepegawaian

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
IV	DL	√			Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)					
1.	DL.01		√		Perencanaan Diklat	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan perencanaan diklat				
	DL.01.01			√	Pedoman Diklat	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyusunan pedoman diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.01.02			√	Kebutuhan Diklat	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kebutuhan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.01.03			√	Program Diklat	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan program diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.01.04			√	Penyusunan Kurikulum Diklat	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum diklat	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.01.05			√	Penyusunan Modul Diklat	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan modul diklat	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.01.06			√	Panduan Fasilitator	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan panduan fasilitator	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.01.07			√	Penyusunan Standar Kompetensi Diklat	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan standar kompetensi diklat	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani kediklatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
2.	DL.01.08			√	Sarana dan Prasarana Diklat	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan sarana dan prasarana diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.01.09			√	Registrasi Sertifikat/STTPL Peserta Diklat	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Registrasi Sertifikat/STTPL Peserta Diklat seperti Surat Permohonan Kode Registrasi, Buku Registrasi, dan Surat Penyampaian Kode Registrasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani kediklatan
3.	DL.02.01		√	√	Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kediklatan Sertifikasi SDM Kediklatan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Sertifikasi SDM Kediklatan seperti Surat Permohonan Sertifikasi, Laporan Hasil Verifikasi Lapangan, Berita Acara Rapat Verifikasi, Berita Acara Rapat Tim Penilai, Surat Keputusan Penetapan Sertifikasi, Sertifikat Sertifikasi, Laporan Sertifikasi Individu	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.03.01		√	√	Diklat CPNS Diklat Prajabatan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat prajabatan seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/(Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.03.02			√	Diklat Pelatihan Dasar (Latsar)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat pelatihan dasar seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
3.	DL.03.03			√	Magang CPNS	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan magang CPNS seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Magang, sertifikat/STTPL, dan lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.03.04			√	Diklat CPNS Lainnya	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat CPNS lainnya seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.04		√		Diklat Kepemimpinan					
	DL.04.01			√	Diklat Pimpinan Tingkat IV	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat Pimpinan Tingkat IV seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.04.02			√	Diklat Pimpinan Tingkat III	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat Pimpinan Tingkat III seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.04.03			√	Diklat Pimpinan Tingkat II	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat prajabatan seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
4.	DL.04.04			√	Diklat Pimpinan Tingkat I	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat prajabatan seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.04.05			√	Latsar Kepemimpinan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Latsar Kepemimpinan seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.04.06			√	Magang Manajerial	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan magang CPNS seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Magang, sertifikat/STTPL, dan lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.04.07			√	Diklat Kepemimpinan Lainnya	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Lainnya seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05			√	Diklat Fungsional					
	DL.05.01			√	Inspektur Minyak dan Gas Bumi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	DL.05.02			√	Inspektur Ketenagalistrikan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.03			√	Inspektur Tambang	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.04			√	Pengamat Gunung Api	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.05			√	Penyelidik Bumi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	DL.05.06			√	Arsiparis	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.07			√	Analisis Kepegawaian	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.08			√	Widyaiswara	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.09			√	Peneliti	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	DL.05.10			√	Perencana	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.11			√	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.12			√	Auditor	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.13			√	Pustakawan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	DL.05.14			√	Pranata Komputer	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.15			√	Pranata Humas	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.16			√	Analisis Kebijakan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.17			√	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	DL.05.18			√	Penata Laksana Barang	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.19			√	Analisis Keuangan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.20			√	Perekayasa	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.21			√	Bidan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	DL.05.22			√	Dokter	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.23			√	Dokter Gigi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.24			√	Instruktur	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.25			√	Asisten Ahli	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	DL.05.26			√	Penerjemah	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.27			√	Perawat Gigi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.28			√	Perawat	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.29			√	Pranata Laboratorium	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
5.	DL.05.30			√	Surveyor	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.31			√	Teknisi Litkayasa	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.05.32			√	Jabatan Fungsional Lainnya	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat fungsional seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.06.01	DL.06		√	Teknis Pertambangan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat teknis Pertambangan seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	DL.06.02			√	Geologi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat teknis Geologi seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.06.03			√	Minyak dan Gas Bumi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat teknis Minyak dan Gas Bumi seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.06.04			√	Ketenagalistrikan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat teknis Ketenagalistrikan seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.06.05			√	EBTKE	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat EBTKE teknis seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
6.	DL.07		√		Diklat Manajemen/ Penunjang					
	DL.07.01			√	Perkantoran	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat Perkantoran seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.07.02			√	Keuangan/Perpajakan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat Keuangan/Perpajakan seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.07.03			√	Bendaharawan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat Bendaharawan seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.07.04			√	Perlengkapan/Barang Milik Negara (BMN)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat Perlengkapan/BMN seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	DL.07.05			√	Hukum	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat Hukum seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.07.06			√	<i>Training of Trainers</i>	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat <i>Training of Trainers</i> seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.07.07			√	<i>Management of Trainers</i>	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat <i>Management of Trainers</i> seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.07.08			√	Pembekalan Purnabakti	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat Pembekalan Purnabakti seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
8	DL.07.09			√	Diklat Manajemen/ Penunjang Lainnya	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat Manajemen/Penunjang Lainnya seperti surat pemanggilan peserta, Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Diklat, Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat, panduan diklat, laporan panitia penyelenggara diklat, sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat, daftar peserta diklat, bahan ajar diklat, daftar hadir peserta diklat, daftar hadir widyaiswara, sertifikat/STTPL, dan sambutan penutupan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.08		√		Evaluasi Penyelenggaraan Diklat					
	DL.08.01			√	Laporan Penyelenggaraan Diklat	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan laporan penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
9	DL.08.02			√	Evaluasi Pasca Diklat	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan evaluasi pasca diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.09		√		Pertemuan Ilmiah					
	DL.09.01			√	Konferensi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan konferensi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.09.02			√	Seminar	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan seminar	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	DL.09.03			√	Penyuluhan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyuluhan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.09.04			√	Lokakarya/ <i>Workshop</i>	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Lokakarya/Workshop	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.09.05			√	Simposium	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Simposium	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.09.06			√	Temukarya	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Temukarya	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.09.07			√	Kongres	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Kongres	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.09.08			√	Sosialisasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
10	DL.10		√		Kegiatan Akademik					
	DL.10.01			√	Akreditasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan akreditasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.10.02			√	Kurikulum	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kurikulum	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.10.03			√	Penerimaan Mahasiswa	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.10.04			√	Program Akademik	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan program akademik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.10.05			√	Ekstrakurikuler	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan ekstrakurikuler	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.10.06			√	Tata Tertib	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan tata tertib	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	DL.10.07			√	Penilaian Akademik	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penilaian akademik seperti <i>copy</i> ijazah dan transkrip nilai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.10.08			√	Tenaga Pengajar	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan tenaga pengajar	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.10.09			√	Evaluasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan belajar mengajar	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani kediklatan
	DL.10.10			√	Wisuda	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan wisuda	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kediklatan
V.	OT	√			Organisasi dan Tata Laksana					
1.	OT.01		√		Penataan Kelembagaan					
	OT.01.01			√	Pembentukan, Perubahan, dan Penghapusan Organisasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembentukan, perubahan dan penghapusan organisasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani organisasi dan tata laksana
	OT.01.02			√	Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Unit Kerja	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan susunan organisasi unit kerja KESDM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani organisasi dan tata laksana
	OT.01.03			√	Rincian Tugas Unit Kerja	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan rincian tugas unit kerja KESDM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani organisasi dan tata laksana

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
2.	OT.01.04			√	Uraian Jabatan dan Tata Kerja	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Uraian Jabatan dan Tata Kerja	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani organisasi dan tata laksana
	OT.01.05			√	Evaluasi Organisasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan evaluasi organisasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani organisasi dan tata laksana
	OT.02		√		Analisis Jabatan					
	OT.02.01			√	Informasi Jabatan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan informasi jabatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani organisasi dan tata laksana
	OT.02.02			√	Evaluasi Jabatan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan evaluasi jabatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani organisasi dan tata laksana
	OT.02.03			√	Perencanaan Pengembangan Jabatan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan perencanaan pengembangan jabatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani organisasi dan tata laksana
	OT.02.04			√	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi jabatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani organisasi dan tata laksana
3.	OT.03		√		Penataan Ketatalaksanaan					
	OT.03.01			√	Sistem dan Prosedur	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sampai dengan penetapan peta bisnis proses, Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan KESDM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani organisasi dan tata laksana

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
4.	OT.03.02			√	Tata Hubungan Kerja	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan tata hubungan kerja meliputi berkas identifikasi, menetapkan focal point, finalisasi, monitoring, dan evaluasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani organisasi dan tata laksana
	OT.03.03			√	Penataan Pelayanan Publik	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan penataan pelayanan publik di lingkungan KESDM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani organisasi dan tata laksana
	OT.04		√		Program Manajemen Perubahan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan program manajemen perubahan				
	OT.04.01			√	Reformasi Birokrasi	Rekaman kegiatan atau yang berkaitan dengan profil reformasi birokrasi meliputi penyusunan roadmap dan pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani organisasi dan tata laksana
	OT.04.02			√	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani organisasi dan tata laksana
VI. 1.	HK HK.01	√		√	Hukum Rancangan Peraturan Perundang-Undangan					
	HK.01.01			√	Rancangan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang meliputi naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
	HK.01.02			√	Rancangan Peraturan Pemerintah	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
2.	HK.01.03			√	Rancangan Peraturan Presiden	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Presiden yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
	HK.01.04			√	Rancangan Keputusan Presiden	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Rancangan Keputusan Presiden yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
	HK.01.05			√	Rancangan Instruksi Presiden	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Rancangan Instruksi Presiden yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
	HK.01.06			√	Peraturan Menteri ESDM	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Menteri ESDM yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
	HK.02		√		Keputusan					
	HK.02.01			√	Keputusan/Ketetapan/Surat Keputusan Menteri ESDM	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan keputusan/ketetapan yang ditetapkan oleh Menteri ESDM, meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai ditetapkan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
	HK.02.02			√	Surat Keputusan Pejabat setingkat Eselon I	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan keputusan/ketetapan yang ditetapkan oleh Pejabat setingkat Eselon I dan/atau atas nama Menteri ESDM, meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai ditetapkan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
	HK.02.03			√	Surat Keputusan Pejabat setingkat Eselon II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan keputusan/ketetapan yang ditetapkan oleh Pejabat setingkat Eselon II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai ditetapkan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
HK.02.04			√	Surat Keputusan Bersama	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan keputusan/ketetapan yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai ditetapkan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum	

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
3.	HK.03		√		Instruksi/Surat Edaran/Surat Perintah					
	HK.03.01			√	Instruksi/Surat Edaran Menteri ESDM	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan instruksi/edaran/perintah Menteri ESDM yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
	HK.03.02			√	Instruksi/Surat Edaran Pejabat setingkat Eselon I	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan instruksi/edaran/perintah pejabat setingkat Eselon I yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
	HK.03.03			√	Instruksi/Surat Edaran Pejabat setingkat Eselon II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Rekaman kegiatan, peristiwa, dan surat yang berkaitan dengan instruksi/edaran/perintah pejabat setingkat Eselon II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
4.	HK.04		√		Bantuan Hukum					
	HK.04.01			√	Bantuan Hukum Pidana	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum kasus pidana meliputi pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum, dan advokasi di bidang energi dan sumber daya mineral dan masalah hukum lainnya di lingkungan KESDM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
	HK.04.02			√	Bantuan Hukum Perdata	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum kasus perdata meliputi pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum, dan advokasi di bidang energi dan sumber daya mineral dan masalah hukum lainnya di lingkungan KESDM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
	HK.04.03			√	Bantuan Hukum Kasus Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum kasus tata usaha negara meliputi pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum, dan advokasi di bidang esdm energi dan sumber daya mineral dan masalah hukum lainnya di lingkungan KESDM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
	HK.04.04			√	Bantuan Hukum Hak Uji Materil	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum kasus hak uji materil meliputi pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum, dan advokasi di bidang energi dan sumber daya mineral dan masalah hukum lainnya di lingkungan KESDM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
5.	HK.04.05			√	Bantuan Hukum <i>Judicial Review</i>	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum kasus <i>judicial review</i> meliputi pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum, dan advokasi di bidang energi dan sumber daya mineral dan masalah hukum lainnya di lingkungan KESDM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
	HK.05		√		Kasus/Sengketa Hukum					
	HK.05.01			√	Kasus/Sengketa Hukum Pidana	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kasus/sengketa hukum pidana meliputi proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis, pembelaan telaah hukum, dan opini hukum	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
	HK.05.02			√	Kasus/Sengketa Hukum Perdata	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kasus/sengketa hukum perdata meliputi proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis, pembelaan telaah hukum, dan opini hukum	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
6.	HK.05.03			√	Kasus/Sengketa Hukum Tata Usaha Negara	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kasus/sengketa hukum tata usaha negara meliputi proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis, pembelaan telaah hukum, dan opini hukum	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
	HK.06		√		Advokasi					
	HK.06.01			√	Pertimbangan dan Konsultasi Hukum	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pelayanan advokasi hukum baik sebagai saksi ahli, penasihat hukum, maupun bantuan hukum	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
	HK.06.02			√	Advokasi Hukum	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian pertimbangan dan konsultasi hukum serta penyusunan naskah perjanjian/kerja sama/peraturan bersama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
7.	HK.07		√		Pembinaan Hukum	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Sosialisasi Hukum	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
8.	HK.08		√		Dokumentasi Hukum	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	unit yang menangani hukum

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
9.	HK.09		√		Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)				
	HK.09.01			√	Hak Cipta	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan hak cipta sampai dengan penyelesaian masalah hak cipta	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
	HK.09.02			√	Hak Paten	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan hak paten, pengurusan masalah hak paten sampai dengan penyelesaian masalah hak paten	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
	HK.09.03			√	Hak Merek	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan hak merk mulai dari pengurusan masalah sampai dengan penyelesaian masalah hak merek	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani hukum
VII.	TU	√			Ketatausahaan					
1.	TU.01		√		Administrasi Menteri/ Pimpinan					
	TU.01.01			√	Sambutan Pidato Menteri/ Pimpinan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan sambutan pidato Menteri/Pimpinan yang ada di lingkungan KESDM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani ketatausahaan
	TU.01.02			√	Ucapan (ucapan terima kasih, simpati, pesan/kesan, dan rekomendasi)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan belasungkawa, dan ucapan permohonan maaf, rekomendasi yang ada di lingkungan KESDM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani ketatausahaan
	TU.01.03			√	Memori Jabatan Menteri/Pimpinan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan memori jabatan Menteri/Pimpinan yang ada di lingkungan KESDM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani ketatausahaan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
2.	TU.02		√		Keprotokolanan					
	TU.02.01			√	Upacara/Acara Kedinasan	Rekaman kegiatan, peristiwa, dan surat yang berkaitan dengan Upacara/Acara Kedinasan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani ketatausahaan
	TU.02.02			√	Kunjungan Kerja (Kedinasan) Pimpinan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kunjungan kerja pimpinan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani ketatausahaan
	TU.02.03			√	Agenda Pimpinan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Agenda Pimpinan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani ketatausahaan
3	TU.03		√		Pencetakan, Penggandaan, dan Penjilidan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan pencetakan, penggandaan, dan penjilidan (naskah pidato/sambutan Menteri, buku acara Menteri/pejabat, buku agenda kegiatan dan buku alamat pejabat) dalam rangka kedinasan di lingkungan KESDM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani ketatausahaan
4	TU.04		√		Perjalanan Dinas	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri				
	TU.04.01			√	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan perjalanan dinas dalam negeri seperti: a. Surat Tugas b. SPPD/Visum c. Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani
	TU.04.02			√	Perjalanan Dinas Luar Negeri	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan perjalanan dinas luar negeri seperti: a. Undangan b. Surat Tugas c. Permohonan Izin d. Rekomendasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri e. Pengurusan Paspor f. Pengurusan Visa g. Exit Permit h. Tiket Pesawat i. SPPD/Visum j. Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
5.	TU.05		√		Praktek Kerja Lapangan/ Magang					
	TU.05.01			√	SMU/SMA/SMK	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan/magang SMU/SMA/SMK	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani ketatausahaan
	TU.05.02			√	Perguruan Tinggi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan/magang perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani ketatausahaan
VIII.	KA	√			Kearsipan					
1.	KA.01		√		Sistem Kearsipan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan administrasi penyusunan sampai dengan penetapan sistem kearsipan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kearsipan
2.	KA.02		√		Pengendalian dan Pengurusan Surat	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan administrasi pengendalian surat meliputi, kartu, lembaran, dan buku agenda	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kearsipan
3.	KA.03		√		Pemeliharaan Arsip					
	KA.03.01			√	Pemberkasan Arsip Aktif	Rekaman kegiatan atau peristiwa surat yang berkaitan dengan Daftar Berkas, Daftar Isi Berkas, dan Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kearsipan
	KA.03.02			√	Penataan Arsip Inaktif	Rekaman kegiatan atau peristiwa surat yang berkaitan dengan Daftar Arsip Inaktif, dan Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kearsipan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
4.	KA.03.03			√	Alih Media Arsip	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan alih media arsip di lingkungan KESDM seperti: a. Laporan identifikasi arsip dinamis yang dialihmediakan b. Daftar arsip yang dialihmedia c. Surat Persetujuan Alih Media d. Berita Acara Alih Media e. Autentifikasi arsip dinamis yang dialihmediakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kearsipan
	KA.03.04			√	Kegiatan Fumigasi Arsip	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan fumigasi arsip	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kearsipan
	KA.04		√		Program Arsip Vital					
	KA.04.01			√	Identifikasi dan Penataan Arsip Vital	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan identifikasi dan penataan arsip vital seperti daftar potensi arsip vital, formulir pendataan arsip vital, dan daftar arsip vital	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kearsipan
	KA.04.02			√	Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan arsip vital seperti duplikasi dan pemencaran	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kearsipan
5.	KA.04.03			√	Penyelamatan dan Pemulihan Arsip Vital	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyelamatan dan pemulihan arsip vital ketika terjadi bencana	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kearsipan
	KA.05		√		Pengelolaan Arsip Terjaga					
	KA.05.01			√	Identifikasi dan Pemberkasan Arsip	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan identifikasi dan pemberkasan arsip terjaga, seperti daftar potensi arsip terjaga, formulir pendataan arsip terjaga, daftar berkas arsip terjaga, dan daftar isi berkas arsip terjaga	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kearsipan
	KA.05.02			√	Pelaporan Arsip	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaporan arsip terjaga, seperti surat tertulis dan daftar arsip terjaga	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kearsipan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
6.	KA.06		√		Penelusuran Sumber Arsip					
	KA.06.01			√	Wawancara Sejarah Lisan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan wawancara sejarah lisan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kearsipan
	KA.06.02			√	Penelusuran Naskah Sumber	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penelusuran naskah sumber	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kearsipan
7.	KA.07		√		Pelayanan Arsip	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan peminjaman dan penggunaan arsip seperti, surat peminjaman, formulir peminjaman, berita acara peminjaman, dan laporan peminjaman	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kearsipan
8.	KA.08		√		Penyusutan Arsip					
	KA.08.01			√	Pemindahan Arsip Inaktif	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pemindahan arsip inaktif seperti surat permohonan pemindahan arsip, berita acara pemindahan, daftar arsip yang dipindahkan, dan laporan pemindahan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kearsipan
	KA.08.02			√	Pemusnahan Arsip	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pemusnahan arsip seperti: surat usulan, berita acara pemusnahan, daftar arsip yang dimusnahkan, rekomendasi penilaian, rekomendasi/pertimbangan/persetujuan instansi terkait, keputusan pemusnahan, dan laporan pemusnahan.	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kearsipan
	KA.08.03			√	Penyerahan Arsip	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyerahan arsip seperti: surat usulan, rekomendasi penilaian, berita acara serah terima arsip, dan daftar arsip yang diserahkan.	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kearsipan
9.	KA.09		√		Pembinaan Kearsipan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan kearsipan, seperti: a. Lomba tertib arsip	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kearsipan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
10.	KA.10		√		Pengawasan Kearsipan	b. Penilaian arsiparis berprestasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kearsipan
						c. Bimbingan teknis/sosialisasi/penyuluhan tentang tata persuratan dan/atau kearsipan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kearsipan
						d. Supervisi dan monitoring tentang tata persuratan dan/atau kearsipan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kearsipan
		KA.10.01			√	Perencanaan Program	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Perencanaan Program Pengawasan Kearsipan seperti: a. Pembentukan Tim b. Penyusunan PKPKT KESDM c. Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM
	KA.10.02		√	Pelaksanaan Audit	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pelaksanaan Audit Kearsipan seperti: a. Audit Kearsipan b. Monitoring	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kearsipan	
	KA.10.03		√	Pelaporan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pelaporan Audit Kearsipan seperti Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kearsipan	

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
IX.	PS	√			Kepustakaan					
1.	PS.01		√		Pengelolaan Bahan Pustaka	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pengelolaan Bahan Pustaka seperti Daftar Buku Induk Koleksi, Daftar Buku Terseleksi, Daftar Buku Dalam Pemesanan, Daftar Buku Dalam Permintaan, Daftar Penerimaan Bahan Pustaka Hasil Pembelian/Hadiah Deposit/Hibah, Daftar Pengiriman Bahan Pustaka Surplus, Lembar Kerja Pengolahan BP (Boram, Pengkatalogan), Shelt List/Jajaran Kartu Utama (Master List), Daftar Tambahan Buku (Assesion List), Daftar/Jajaran Kendali (Subjek dan Pengarang)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepastakaan
2.	PS.02		√		Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka seperti Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka Deposit, Administrasi Pengolahan Deposit Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepastakaan
3.	PS.03		√		Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi seperti Data dan Statistik Anggota, Pengunjung dan Peminjaman Bahan Pustaka, Daftar Pengunjung dan Peminjam serta Rujukan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepastakaan
4.	PS.04		√		Preservasi Bahan Pustaka	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Preservasi Bahan Pustaka meliputi :				
	PS.04.01			√	Survei Kondisi Bahan Pustaka	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Survei Kondisi Bahan Pustaka seperti Surat Menyurat Kegiatan Survei, Pelaksanaan Survei, Laporan Hasil Survei	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepastakaan
	PS.04.02			√	Refrogragi Bahan Pustaka	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Refrogragi Bahan Pustaka seperti Surat Permohonan Reprografi, Laporan Hasil Reprografi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kepastakaan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER							
X. 1.	RT	√			Kerumahtangaan						
	RT.01		√		Pelayanan Kerumahtangaan						
	RT.01.01			√	Pelayanan Umum	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kerumahtangaan yang meliputi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, pengelolaan ruang kerja, pengelolaan ruang pertemuan/rapat/lapangan upacara, peminjaman sarana, dan prasarana kantor	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtangaan	
	RT.01.02			√	Pelayanan Khusus	Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan layanan kepada pimpinan, penyediaan petugas kebersihan dan penyediaan petugas pendukung lainnya.	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtangaan	
	RT.01.03			√	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pakaian dinas pegawai, satuan pengamanan, tenaga honorer, pramubakti, petugas kebersihan dan petugas pendukung lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtangaan	
	2.	RT.02		√		Pemeliharaan dan Perbaikan					
	RT.02.01			√	Perbaikan Gedung	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pemeliharaan gedung, izin renovasi/perbaikan ruang kerja/gedung dan izin pembangunan gedung	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtangaan	
	RT.02.02			√	Perbaikan rumah dinas/wisma	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan rumah dinas, izin renovasi/perbaikan rumah dinas/gedung dan izin penggunaan rumah dinas dan izin pembangunan rumah dinas/wisma	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtangaan	
	RT.02.03			√	Pertamanan/ <i>landscaping</i> / penghijauan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan pertamanan/ <i>landscaping</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtangaan	

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
3.	RT.02.04			√	Peralatan kantor, mesin, dan pengolah data	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor, mesin, dan pengolah data	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtanggaan
	RT.02.05			√	Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan KESDM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtanggaan
	RT.03.01		√		Pengelolaan Gedung Manajemen Gedung	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan seperti penyelenggaraan manajemen gedung, audit energi gedung kantor, dan konservasi energi gedung kantor	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtanggaan
	RT.03.02			√	<i>Green Building</i>	Rekaman Kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan <i>green building</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtanggaan
4.	RT.04.01		√		Pengelolaan Jaringan Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan perbaikan, pemeliharaan, pemasangan jaringan telekomunikasi meliputi telepon, dan <i>Base Transceiver Station (BTS)</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtanggaan
	RT.04.02			√	Pengelolaan Jaringan Listrik	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan perbaikan, pemeliharaan, dan pemasangan jaringan listrik.	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtanggaan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
5.	RT.04.03			√	Pengelolaan Jaringan Air	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan perbaikan, pemeliharaan, dan pemasangan jaringan air	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtangaan
	RT.04.04			√	Pengelolaan Televisi (TV) Kabel	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan TV Kabel dan/atau Internet	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtangaan
	RT.04.05			√	Pelaksanaan Penghematan Energi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan penghematan energi di lingkungan kantor	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtangaan
	RT.05		√		Pengelolaan Kendaraan Dinas					
	RT.05.01			√	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat-surat kendaraan dinas dan penatausahaan pengelolaan kendaraan dinas	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtangaan
	RT.05.02			√	Pengelolaan Kendaraan Dinas	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan kebutuhan kendaraan dinas, rekomendasi pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas.	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtangaan
	RT.05.03			√	Penggunaan Kendaraan Dinas	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan, pengelolaan, dan penggunaan kendaraan dinas	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtangaan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
6.	RT.06		√		Ketertiban dan Keamanan					
	RT.06.01			√	Pengamanan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat dan tamu pejabat, rumah dinas, sarana dan prasarana kantor yang meliputi, penatausahaan surat ijin masuk/keluar BMN dan orang, pendayagunaan petugas pengamanan, petugas jaga/piket, penatausahaan kejadian/gangguan/pelanggaran, mobilisasi demonstran dan kerja sama dengan Kepolisian/TNI dan aparat keamanan lainnya.	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtangaan
	RT.06.02			√	Pengelolaan Ketertiban dan Keamanan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan laporan ketertiban dan keamanan meliputi kehilangan, kerusakan, kecelakaan, gangguan, dan penertiban penggunaan sarana dan prasarana, serta hal-hal koordinasi partisipatif lainnya terkait komunikasi dengan lingkungan sekitar	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtangaan
	RT.06.03			√	Administrasi Pengelolaan Parkir	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan, pengelolaan, dan penyediaan lahan parkir	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kerumahtangaan
XI.	KM	√			Komunikasi dan Informasi Publik Media Massa					
1.	KM.01		√							
	KM.01.01			√	Liputan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan liputan yang meliputi proses pengumpulan/pengolahan data dan informasi sebagai bahan publikasi dengan melakukan perekaman suara maupun gambar sebagai gambaran jalannya peristiwa	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kehormatan
	KM.01.02			√	Wawancara	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan wawancara yang meliputi kegiatan pengolahan, penyusunan, penyajian, penyebaran hasil wawancara yang mengaitkan antara draf pertanyaan, bahan wawancara, dan narasumber dengan media sebagai pemohon	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kehormatan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	KM.01.03			√	Penyajian Berita dan Konten Media Sosial	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan penyajian berita dan konten media sosial yang meliputi kegiatan pemaparan/ penjelasan data dan informasi sebagai bahan publikasi biasanya disajikan dalam bentuk siaran pers dan konten infografis	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kehumasan
	KM.01.04			√	Pertemuan Media Massa	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pertemuan media massa meliputi kegiatan pembahasan isu sektor ESDM dengan memfasilitasi pertemuan narasumber dengan berbagai media dalam bentuk diskusi atau konferensi pers berdasarkan undangan dari KESDM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kehumasan
	KM.01.05			√	Dokumentasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi yang meliputi kegiatan pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi berupa dokumen-dokumen seperti foto, gambar, video, dan buku.	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kehumasan
	KM.01.06			√	<i>Kompetisi Jurnalistik</i>	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan kompetisi jurnalistik meliputi kegiatan pemberian apresiasi kepada jurnalis media yang memiliki atensi khusus dalam sektor ESDM energi dan sumber daya mineral	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kehumasan
	KM.01.07			√	<i>Press Tour</i>	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan <i>press tour</i> meliputi kegiatan kunjungan media nasional yang diprakarsai KESDM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kehumasan
2.	KM.02.01		√		Opini Publik					
	KM.02.01			√	Analisis Opini Publik	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan analisis opini publik meliputi kegiatan pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	Unit yang menangani kehumasan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
3.	KM.02.02			√	Kliping/Berita Sektor energi dan sumber daya mineral	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan kliping/berita sektor ESDM energi dan sumber daya mineral meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan berita	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kehumasan
	KM.02.03			√	Strategi Komunikasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan strategi komunikasi meliputi kegiatan <i>media visit</i> dan <i>media coaching</i> menteri dan para pejabat eselon I dan eselon II di lingkungan KESDM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kehumasan
	KM.03		√		Produksi Komunikasi					
	KM.03.01			√	Pembuatan Film atau Video	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan film atau video yang meliputi informasi berupa citra bergerak dan terekam dalam rangkaian fotografik dan suara pada pita magnetik yang penciptaannya menggunakan media teknologi/elektronik.	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kehumasan
	KM.03.02			√	<i>Advertorial</i> Cetak dan Online	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan <i>advertorial</i> cetak dan online meliputi pembuatan berita, artikel atau iklan di media cetak dan daring (online)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kehumasan
	KM.04		√		Hubungan Antar Lembaga					
	KM.04.01			√	Hubungan Antar Lembaga Pemerintah	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga pemerintah meliputi kegiatan yang berhubungan dengan antar kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	unit yang menangani kehumasan
	KM.04.02			√	Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga non pemerintah meliputi kegiatan yang berhubungan dengan antar lembaga dengan perusahaan/swasta, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi/sekolah dan lembaga non pemerintah lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	unit yang menangani kehumasan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
5.	KM.04.03			√	Forum Kehumasan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan/badan koordinasi hubungan masyarakat (Bakohumas)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kehumasan
	KM.05		√		Pelayanan Informasi Publik					
	KM.05.01			√	Publikasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan publikasi meliputi kegiatan diseminasi informasi, penyampaian dan penyebaran informasi melalui media cetak dan online, seperti leaflet/brosur, banner, pameran foto, pameran bidang energi dan sumber daya mineral	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kehumasan
6.	KM.05.02			√	Layanan Informasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan layanan informasi meliputi permohonan informasi baik melalui surat maupun telepon, keterbukaan informasi publik, pengaduan masyarakat, pojok informasi, unit layanan terpadu, dan pelayanan informasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kehumasan
	KM.06		√		Audiensi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan audiensi sampai dengan laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	Unit yang menangani kehumasan
XII.	KS	√			Kerja Sama					
1.	KS.01		√		Kerja Sama Dalam Negeri					
	KS.01.01			√	Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama dalam negeri meliputi penyiapan bahan, Penyusunan Dokumen perjanjian Kerja Sama (Nota Kesepahaman, dan lain-lain), pelaksanaan penandatanganan, dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kerja sama antar instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah				

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
XIII. 1.	BN BN.01 BN.01.01	√	√	√	Pengelolaan BMN Perencanaan Kebutuhan Rencana kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	d. Laporan Pasca Pertemuan Internasional	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kerja sama
						e. Dokumen Hasil Pertemuan Internasional (<i>Minutes of Meeting, Agreed Minutes, Record of Discussion, dan Wrap-Up Discussion</i>)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kerja sama
						f. Dokumen Perjanjian Kerja Sama (<i>Memorandum of Understanding (MoU), Letter of Intent (LoI), communique, declaration, dan Agreement lainnya</i>)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kerja sama
						g. Pemantauan evaluasi pelaksanaan kerja sama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani kerja sama
						Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan perencanaan dan penelaahan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) seperti:	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
						a. Penelitian Usulan RKBMN				
						b. Hasil Penelitian Usulan RKBMN				
						c. Reviu RKBMN				
						d. Hasil Reviu RKBMN				
						e. Penelaahan RKBMN				
f. Hasil Penelaahan RKBMN										
g. Penelitian Usulan Perubahan RKBMN										
h. Hasil Penelitian Usulan Perubahan RKBMN										
i. Reviu Perubahan RKBMN										
j. Hasil Reviu Perubahan RKBMN										
k. Penelaahan Perubahan RKBMN										

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
2.	BN.01.02			√	Standardisasi Sarana dan Prasarana	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan standardisasi sarana dan prasarana	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
	BN.01.03			√	Standardisasi Harga	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan standardisasi harga	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
	BN.02		√		Pengadaan					
	BN.02.01			√	Persiapan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Negara (BMN)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
	BN.02.02			√	Pelaksanaan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan melalui kegiatan: a. <i>E-Purchasing</i> b. Pengadaan Langsung c. Penunjukan Langsung d. Tender Cepat e. Tender	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
	BN.02.03			√	Evaluasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan pengadaan Barang Milik Negara (BMN)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
	BN.02.04			√	Penyimpanan/Pergudangan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Penyimpanan/ Pergudangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
3.	BN.03		√		Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)					
	BN.03.01			√	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) seperti: a. permintaan pengalihan status penggunaan BMN dan rincian BMN yang akan dialihkan status penggunaannya b. dokumen kepemilikan BMN c. analisis/telaah atas permintaan pengalihan status penggunaan BMN a. penolakan/persetujuan usulan pengalihan status penggunaan BMN e. permintaan penetapan BMN dan daftar rincian BMN yang akan dialihkan statusnya a. penetapan status penggunaan BMN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
	BN.03.02			√	Distribusi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan distribusi Barang Milik Negara (BMN)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
	BN.03.03			√	Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pengalihan status Barang Milik Negara (BMN) seperti: a. Surat permintaan pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) b. Rincian Barang Milik Negara (BMN) (berupa tanah dan/atau bangunan) yang akan dialihkan status penggunaannya. c. Fotokopi dokumen kepemilikan Barang Milik Negara (BMN) d. Analisis/telaahan staf atas permintaan pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) e. Surat penolakan/persetujuan usulan pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) f. Surat permintaan penetapan Barang Milik Negara (BMN) g. Rincian Barang Milik Negara (BMN) penggunaannya.	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER							
4.	BN.04		√		Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)	h. Surat penolakan/persetujuan usulan penetapan Barang Milik Negara (BMN) i. Arsip lain yang berkaitan dengan penetapan Barang Milik Negara (BMN) Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan, seperti: sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara	
		BN.04.01			√	Sewa Barang Milik Negara (BMN)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan sewa Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk perjanjian a. Surat permohonan sewa Barang Milik Negara (BMN) b. Rincian Barang Milik Negara (BMN) c. Surat permohonan penilaian d. Laporan hasil penilaian Barang Milik Negara (BMN) e. Laporan tim penyewaan f. Analisis/telaahan staf atas permohonan sewa g. Naskah dinas usulan persetujuan dan penolakan sewa Barang Milik Negara (BMN) h. Arsip lain yang berkaitan dengan sewa Barang Milik Negara (BMN)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
		BN.04.02			√	Pinjam Pakai Barang Milik Negara (BMN)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pinjam pakai Barang Milik Negara (BMN)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
		BN.04.03			√	Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
		BN.04.04			√	Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara (BMN)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
5.	BN.04.05			√	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
	BN.05		√		Pengamanan dan Pemeliharaan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN)				
	BN.05.01			√	Objek Vital Nasional	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pengamanan dan pemeliharaan BMN meliputi: a. surat pemeriksaan lapangan terkait permohonan obvitnas b. evaluasi lapangan c. berita acara terkait inventarisasi dan verifikasi d. laporan hasil kegiatan e. Surat Keputusan Penetapan Objek Vital Nasional	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
	BN.05.02			√	Terminasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan terminasi meliputi: a. Surat Pemeriksaan Lapangan terkait Penelitian Administrasi dan Pemeriksaan Fisik b. Berita Acara Penelitian Administrasi dan Pemeriksaan Fisik c. Laporan Penelitian Administrasi dan Pemeriksaan Fisik d. Laporan Hasil Kegiatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
	BN.05.03			√	Pengamanan BMN	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pengamanan BMN meliputi: a. surat pengawasan dan pengendalian BMN Satuan Kerja b. Berita acara pengawasan dan pengendalian BMN c. Laporan hasil pengawasan dan pengendalian d. Laporan hasil kegiatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
6.	BN.05.04			√	Pencatatan Aset melalui Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP BMN)	Rangkaian kegiatan, peristiwa, dan surat yang berkaitan dengan pengamanan dan pemeliharaan BMN meliputi: a. Surat Rekon Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah b. Berita Acara Rekon Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah c. Laporan hasil pemeriksaan fisik Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP) d. Laporan hasil kegiatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
	BN.06		√		Penilaian Barang Milik Negara (BMN)					
	BN.06.01			√	Laporan Penilaian	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan laporan penilaian Barang Milik Negara (BMN)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
	BN.06.02			√	Data dan Informasi Penilaian	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan data dan informasi penilaian Barang Milik Negara (BMN)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
7.	BN.06.03			√	Penilaian/Cek Fisik	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan data dan informasi penilaian BMN meliputi Berita Acara Administrasi dan Fisik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
	BN.07		√		Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN)					
	BN.07.01			√	Penjualan Barang Milik Negara (BMN)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penjualan Barang Milik Negara (BMN) seperti: a. Surat Keterangan Keberadaan Barang b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nilai Limit BMN c. Surat Penunjukan Pejabat Penjual d. Surat Penetapan Harga Limit e. Pengumuman/Iklan Lelang f. Berita Acara Peninjauan Objek Lelang	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	BN.07.02			√	Tukar Menukar Barang Milik Negara (BMN)	g. Berita Acara Aanwijzing h. Surat Keterangan Estimasi Berat/Tonasi BMN i. Berita Acara Serah Terima BMN dengan Pemenang Lelang j. Surat Keterangan Terkait Dokumen Kepemilikan Lelang Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan tukar menukar BMN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
	BN.07.03			√	Hibah Barang Milik Negara (BMN)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan hibah BMN meliputi: a. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah/Alih Status Penggunaan BMN b. Berita Acara Serah Terima Hibah/Penetapan Status Pengguna (PSP) BMN c. Naskah Hibah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
	BN.07.04			√	Penyertaan Modal Pemerintah	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
8.	BN.08		√		Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pemusnahan BMN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
9.	BN.09		√		Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penghapusan BMN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara
10.	BN.10		√		Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)					
	BN.10.01			√	Inventarisasi	Rekaman Kegiatan atau Peristiwa yang berkaitan dengan Inventarisasi Barang Milik Negara, seperti: a. Berita Acara Inventarisasi K/L b. Laporan Hasil Inventarisasi K/L c. Berita Acara Inventarisasi Transaksi Khusus /BUN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER							
XIV. 1.	BN.10.02			√	Rekonsiliasi	Rekaman Kegiatan atau Peristiwa yang berkaitan dengan Rekonsiliasi dan Klarifikasi BMN, seperti: a. Berita Acara Rekonsiliasi K/L b. Berita Acara Rekonsiliasi Transaksi Khusus /BUN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara	
	BN.10.03			√	Laporan	Rekaman Kegiatan atau Peristiwa yang berkaitan dengan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal terkait Laporan BMN, seperti: a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) K/L b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Transaksi Khusus	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengelolaan barang milik negara	
	DI				Data dan Teknologi Informasi						
	DI.01		√		Pengelolaan Data						
	DI.01.01				√	Rencana Pengelolaan Data	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Rencana Pengelolaan Data	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	unit yang menangani data dan teknologi informasi
	DI.01.02				√	Pengumpulan dan Pengolahan Data Energi dan Sumber Daya Mineral	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pengumpulan dan Pengolahan Data Energi dan Sumber Daya Mineral	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	unit yang menangani data dan teknologi informasi
DI.01.03				√	Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	unit yang menangani data dan teknologi informasi	
DI.01.04				√	Pembinaan pengelolaan data	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Pembinaan pengelolaan data	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	unit yang menangani data dan teknologi informasi	

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
2.	DI.01.05			√	Layanan data energi dan sumber daya mineral	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Layanan data energi dan sumber daya mineral	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	unit yang menangani data dan teknologi informasi
	DI.02		√		Kajian Strategis					
	DI.02.01			√	Penyusunan dan/atau Perumusan rekomendasi kebijakan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Penyusunan dan/atau Perumusan rekomendasi kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani data dan teknologi informasi
	DI.02.02			√	Usulan kajian strategis energi dan mineral	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan usulan kajian strategis energi dan mineral	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani data dan teknologi informasi
	DI.02.03			√	Pembinaan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan kajian strategis	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani data dan teknologi informasi
3.	DI.02.04			√	Implementasi Kebijakan Naskah Akademik	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan implementasi kebijakan naskah akademik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani data dan teknologi informasi
	DI.03		√		Teknologi Informasi					
	DI.03.01			√	Pelaksanaan dan Pembinaan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pembinaan teknologi informasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	unit yang menangani data dan teknologi informasi
	DI.03.02			√	Pengelolaan Data Center	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pengelolaan data center	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani data dan teknologi informasi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	DI.03.03			√	Pengelolaan Sarana Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pengelolaan sarana infrastruktur	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani data dan teknologi informasi
	DI.03.04			√	Pengembangan Jaringan dan Sarana Infrastruktur	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pengembangan jaringan dan sarana infrastruktur	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani data dan teknologi informasi
	DI.03.05			√	Dokumen <i>Hosting</i>	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan dokumen hosting	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani data dan teknologi informasi
	DI.03.06			√	Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pembuatan dan pengembangan sistem informasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani data dan teknologi informasi
	DI.03.07			√	Pemberian Fasilitas dan Layanan aplikasi sistem informasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan fasilitas dan layanan sistem informasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	unit yang menangani data dan teknologi informasi
	DI.03.09			√	Pemeliharaan dan Keamanan Sistem Informasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pemeliharaan dan keamanan sistem informasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani data dan teknologi informasi
	DI.03.10			√	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani data dan teknologi informasi

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
XV.	PW	√			Pengawasan					
1.	PW.01		√		Audit					
	PW.01.01			√	Audit Keuangan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas organisasi/unit kerja, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan, dan tindak lanjut hasil audit	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.01.02			√	Audit Kinerja	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas organisasi/unit kerja, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan, dan tindak lanjut hasil audit	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.01.03			√	Audit dengan Tujuan Tertentu	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan audit tujuan tertentu, mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan, dan tindak lanjut hasil audit	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.01.04			√	Probity Audit	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan audit probity meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan, dan tindak lanjut hasil audit	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.01.05			√	Audit Berbasis Resiko	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan audit berbasis resiko meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan, dan tindak lanjut hasil audit	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.01.06			√	Audit Kebijakan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan audit tujuan kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan, dan tindak lanjut hasil audit	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
2.	PW.02		√		Reviu					
	PW.02.01			√	Reviu Laporan Keuangan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan reviu laporan keuangan baik semesteran dan tahunan meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
3.	PW.02.02			√	Reviu RKA-KL	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan reviu RKA-KL meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.02.03			√	Reviu Lainnya	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan reviu laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), revisi anggaran, aspek keuangan tertentu, aspek kinerja tertentu, aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan hasil kajian pengawasan tertentu baik semesteran dan tahunan meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.03		√		Evaluasi					
	PW.03.01			√	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.03.02			√	Evaluasi Reformasi dan Birokrasi (RB)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan monitoring pelaksanaan RB dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan KESDM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.03.03			√	Evaluasi Program Lainnya	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi program meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
PW.04				Pemantauan/Monitoring						
PW.04.01			√	√	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan kegiatan/program unit kerja meliputi perencanaan hingga pelaporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
4.	PW.04.02			√	Pemantauan Lainnya	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan lainnya selain pemantauan kegiatan/program unit kerja meliputi perencanaan hingga pelaporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.05		√		Pengaduan Masyarakat					
	PW.05.01			√	Internal	Rekaman kegiatan, peristiwa, dan surat yang berkaitan dengan Internal	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.05.02			√	Eksternal	Rekaman kegiatan, peristiwa, dan surat yang berkaitan dengan Eksternal	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
5.	PW.05.03			√	Pengaduan Masyarakat berkadar pengawasan dan <i>Whistleblowing System</i>	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dan <i>Whistleblowing System</i>	Terbatas	Menteri, Inspektur Jenderal, Inspektur Terkait dan Tim Pengelola <i>Whistleblowing</i> , Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.06		√		Laporan Hasil Pengawasan					
	PW.06.01			√	Ikhtisar Hasil Pengawasan	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik yang disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK maupun BPKP serta tanggapan atas Laporan Hasil Pengawasan BPK mencakup Tindak Lanjut atas Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
6.	PW.07		√		Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)					
	PW.07.01			√	Laporan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap kerugian Negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) seperti: a. Laporan Kehilangan b. Berita Acara Kehilangan Barang/Uang	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
7.	PW.08		√		Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	c. Surat Keputusan Tanggung Jawab Mutlak (Surat kesanggupan untuk mengganti ke kas Negara, Surat Keputusan Penghapusan uang dan barang sampai laporan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi)				
	PW.08.01			√	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK meliputi data dukung tindak lanjut, pemantauan, sampai dengan pelaporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.08.02			√	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan BPKP	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan tindak lanjut laporan hasil pengawasan BPKP meliputi data dukung tindak lanjut, pemantauan, sampai dengan pelaporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.08.03			√	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pemantauan LHP Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti meliputi surat tugas sampai dengan pelaporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
8.	PW.09		√		Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					
	PW.09.01			√	Pengendalian Gratifikasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pengendalian gratifikasi sampai dengan pelaporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.09.02			√	Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Zona Integritas (WBK dan WBBM) sampai dengan pelaporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.09.03			√	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian SPIP	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
9.	PW.09.04			√	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Rekaman kegiatan, peristiwa, dan surat yang berkaitan dengan LHKPN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.09.05			√	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Rekaman kegiatan, peristiwa, dan surat yang berkaitan dengan LHKASN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.10		√		Kegiatan Pengawasan Lainnya					
	PW.10.01			√	Konsultasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan pembimbingan dan konsultasi atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/program kerja/anggaran	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.10.02			√	Sosialisasi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan pemberian atau pendistribusian informasi terkait kebijakan pengawasan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana Terkait, Publik, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.10.03			√	Asistensi	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan dan supervisi atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/program kerja/anggaran	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.10.04			√	Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas)/Rapat Koordinasi Pengawas (Rakorwas)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan Rakerwas/Rakorwas yang meliputi surat penugasan, surat undangan, narasumber, sampai dengan pelaporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan
	PW.10.05			√	Koordinasi dengan aparat penegak hukum	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan PPNS, pemberian keterangan ahli, dan kegiatan lainnya terkait koordinasi dengan aparat hukum	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan

NO	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI ARSIP			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
	PW.10.06			√	Penyusunan Usulan Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (UPKPT) dan Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT)	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Penyusunan Usulan Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (UPKPT) dan Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pengawas Internal/ Eksternal, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM	unit yang menangani pengawasan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

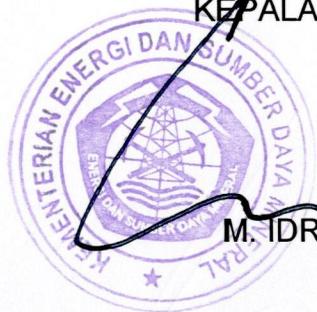
ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SHITE

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 167.K/04/MEM/2020

TANGGAL : 8 September 2020

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

PEDOMAN PENERAPAN

POLA KLASIFIKASI ARSIP

I. PENDAHULUAN

Pola klasifikasi digunakan untuk melakukan penataan berkas dengan sistem masalah. Adapun tujuan penggunaan pola klasifikasi ini adalah agar arsip yang masalahnya sama akan terkumpul/terkelompok dalam satu berkas sehingga penyimpanannya dapat dilakukan secara logis dan sistematis yang pada akhirnya akan memudahkan penemuan kembali.

Pola klasifikasi arsip disusun sebagai sarana penataan arsip mulai dari penciptaan, pengendalian, penyimpanan, penemuan kembali, sampai dengan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dengan pola klasifikasi arsip diharapkan dapat memudahkan dalam pelaksanaan pemberian kode klasifikasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang terkandung dalam arsip secara tepat dan benar.

Pola klasifikasi ini dibedakan menjadi pola klasifikasi fasilitatif dan pola klasifikasi substantif. Pola klasifikasi fasilitatif menggambarkan tugas-tugas yang mendukung kegiatan pokok sedangkan pola klasifikasi substantif menggambarkan kegiatan pokok Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

II. SISTEMATIKA POLA KLASIFIKASI ARSIP

Pola klasifikasi arsip diartikan sebagai pengelompokkan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode.

A. Sistem Klasifikasi

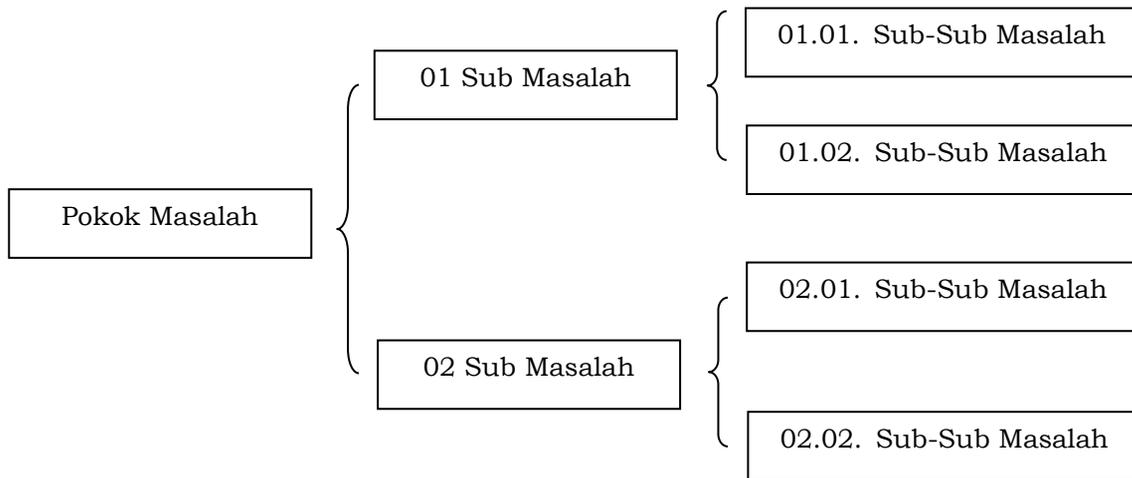
Klasifikasi arsip dengan sistem ini (struktur kegiatan dan permasalahan) dapat digunakan oleh setiap unit kerja, sebagai contoh klasifikasi masalah “keuangan” tidak berarti bahwa yang boleh menggunakan hanya “Biro Keuangan” saja, tetapi Unit Kerja lain dapat menggunakannya.

Tujuan penggunaan klasifikasi arsip untuk dapat mengelompokkan arsip yang masalahnya sama dalam satu berkas, mengatur penyimpanan arsip secara logis dan sistematis, dan untuk memudahkan dalam kegiatan penemuan kembali.

Dalam proses administrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan fungsi utamanya, terdapat 2 (dua) kegiatan pokok yaitu kegiatan fasilitatif dan kegiatan substantif. Berdasarkan hal tersebut, maka pola klasifikasi arsip Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:

- a. pola klasifikasi arsip substantif, yaitu kelompok arsip yang menyangkut kegiatan-kegiatan unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- b. pola klasifikasi arsip fasilitatif, yaitu kelompok arsip yang menyangkut kegiatan-kegiatan unsur pendukung kegiatan pokok Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pola klasifikasi tersebut di atas disusun lebih lanjut berdasarkan pada pengelompokkan menurut masalah (*subject*). Kegiatan yang terdiri dari beberapa masalah pokok (*main subject*) dan setiap masalah pokok dapat terdiri dari beberapa sub masalah (*sub subject*) dan tiap sub-sub masalah (*sub-sub subject*).



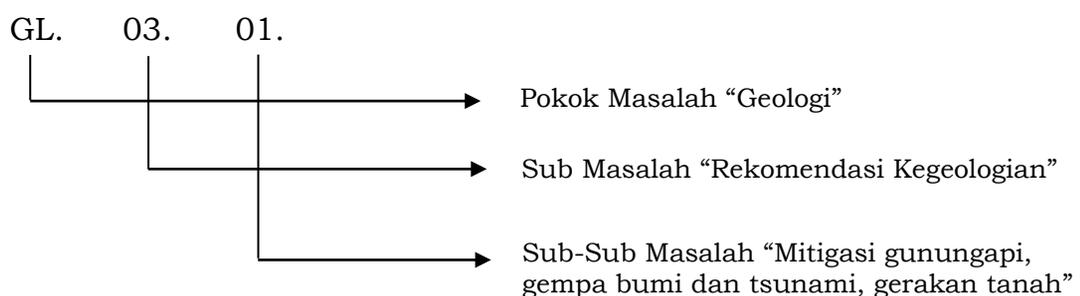
Contoh klasifikasi arsip masalah keuangan:

Pokok Masalah	Sub Masalah	Sub-Sub Masalah
1	2	3
KU. Keuangan	01. Tata Laksana Keuangan	01.01. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
		01.02. Pinjaman/Hibah Langsung Luar Negeri Barang/Jasa
		01.03. dst
	02. Pelaksanaan Anggaran	02.01. Belanja Barang
		02.02. Belanja Modal
		02.03. Dst

B. Kode Klasifikasi

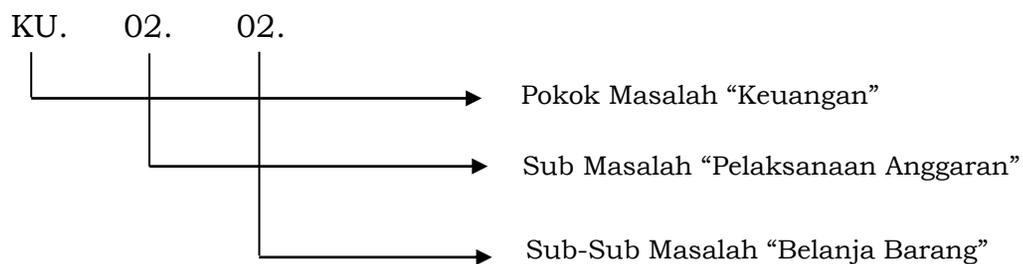
Pemberian kode merupakan kegiatan pemberian tanda pengenal pada arsip, dengan maksud untuk menyingkat tulisan dalam mengenali masalahnya. Sistem yang dipergunakan untuk pemberian kode adalah alfanumerik yaitu penggabungan kode huruf dan angka. Kode huruf digunakan untuk mengenali masalah pokok, sedangkan kode angka untuk sub masalah dan sub-sub masalah.

Contoh 1 (Substantif) :



Penggunaan kode klasifikasi arsip GL.03.01 adalah untuk sub-sub masalah yang ada kaitannya dengan Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan Tanah/Tanah Longsor dan Banjir Bandang, Mitigasi Bencana Geologi (Letusan Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi, dan Tsunami, Rencana Kontijensi Bencana Geologi (Gunungapi, Gempabumi, Gerakan Tanah, dan Tsunami), Analisis Risiko Bencana Geologi (Gunungapi, Gempabumi, Gerakan Tanah, dan Tsunami), Penetapan Status Aktivitas Gunungapi, Penetapan Klasifikasi Gunungapi, Penetapan Kawasan Rawan Bencana Gunungapi, Penetapan Zona Kerentanan Gerakan Tanah, Penetapan Kawasan Rawan Bencana Gempabumi, Penetapan Kawasan Rawan Bencana Tsunami.

Contoh 2 (Fasilitatif) :



Penggunaan kode klasifikasi arsip KU.02.02. adalah untuk sub-sub masalah yang ada kaitannya dengan kegiatan belanja barang meliputi belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) dan belanja bantuan sosial.

C. Penomoran Naskah Dinas

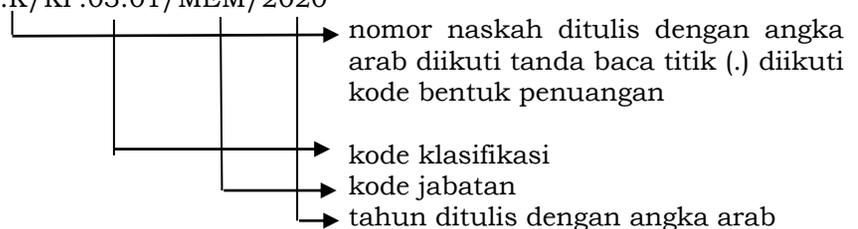
Penomoran naskah dinas mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Contoh penomoran:

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Contoh:

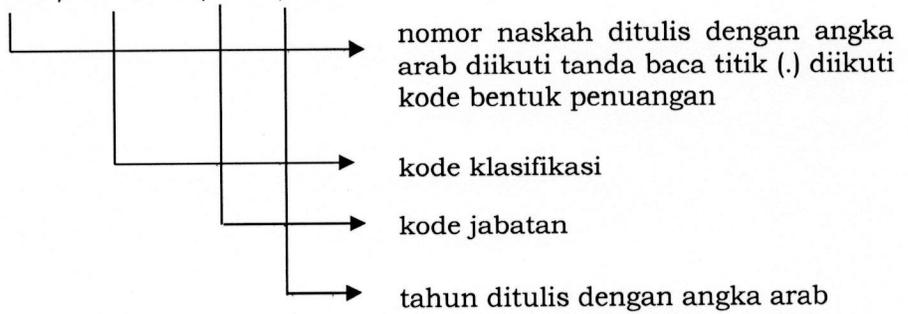
NOMOR : 100.K/KP.03.01/MEM/2020



2. Keputusan berdasarkan mandat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Contoh:

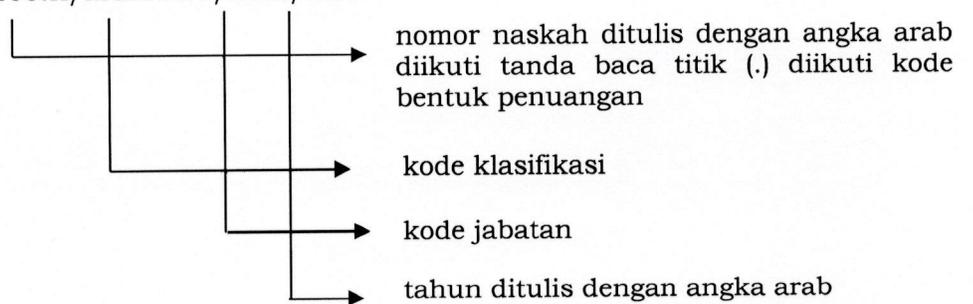
NOMOR : 100.K/MG.01.01/DJM/2020



3. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan delegasi/pelaksanaan tugas sehari-hari

Contoh:

NOMOR : 100.K/MG.01.01/DJM/2020



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 167.K/04/MEM/2020

TANGGAL : 8 September 2020

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

PEDOMAN PENERAPAN

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP

I. PENDAHULUAN

Arsip merupakan salah satu informasi yang memiliki kekuatan hukum, karena arsip merupakan informasi terekam atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan aktivitas setiap lembaga penciptanya. Arsip sangat signifikan dalam menjawab keinginan masyarakat untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sehingga mempercepat perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pengelolaan arsip menjadi penting bukan hanya pengelolaan fisik tetapi juga pengelolaan informasi sejak arsip diciptakan, digunakan, dipelihara sampai dengan disusutkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah mengubah paradigma bahwa semula informasi arsip prinsipnya tertutup untuk publik menjadi terbuka walaupun ada sebagian informasi dikecualikan atau tertutup. Perubahan paradigma tersebut harus diimbangi dengan pengaturan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip untuk melindungi fisik dan informasi arsip.

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip merupakan salah satu elemen pokok yang harus dipenuhi dalam pengelolaan arsip dinamis pada setiap lembaga negara sebagai pencipta arsip termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya pada Pasal 40 Ayat (4).

Sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip digunakan sebagai dasar dalam memberikan layanan informasi publik secara cermat terhadap jenis-jenis informasi arsip sehingga dapat menjamin keamanan dan akurabilitas informasinya.

Melalui sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diharapkan layanan informasi arsip bagi publik dapat terlaksana secara benar dan efektif tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan.

II. KLASIFIKASI KEAMANAN

Klasifikasi keamanan arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, negara, masyarakat, dan perorangan. Sehubungan dengan hal tersebut, kerahasiaan atau keterbukaan arsip menyangkut kewajiban untuk merahasiakan informasi tertentu kepada pihak yang tidak berhak. Klasifikasi keamanan arsip dinamis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terbagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Biasa/Terbuka

Klasifikasi informasi arsip yang apabila diketahui oleh publik tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Terbatas

Klasifikasi informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Rahasia

Klasifikasi informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan, sumber daya nasional, dan ketertiban umum.

4. Sangat Rahasia

Klasifikasi informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.

A. Perlakuan Arsip Berdasarkan Klasifikasi Keamanan Arsip

NO.	JENIS PERLAKUAN	KLASIFIKASI KEAMANAN			
		BIASA	TERBATAS	RAHASIA	SANGAT RAHASIA
1.	Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan	Naskah dinas Biasa/Terbuka diberikan kode "B" dengan menggunakan tinta hitam pada amplop dan disebelah kiri atas naskah dinas	Naskah dinas Terbatas diberikan kode "T" dengan menggunakan tinta hitam pada amplop dan disebelah kiri atas naskah dinas	Naskah dinas Rahasia diberikan kode "R" dengan menggunakan tinta merah pada amplop dan disebelah kiri atas naskah dinas	Naskah dinas Sangat Rahasia diberikan kode "SR" dengan menggunakan tinta merah pada amplop dan disebelah kiri atas naskah dinas
			Tanda klasifikasi keamanan Terbatas dari arsip elektronik harus dicantumkan dalam metadatanya	Tanda klasifikasi keamanan Rahasia dari arsip elektronik harus dicantumkan dalam metadatanya	Tanda klasifikasi keamanan Sangat Rahasia dari arsip elektronik harus dicantumkan dalam metadatanya
2	Penomoran	Naskah dinas korespondensi ekstern Biasa/Terbuka diberikan kode "B" pada penomoran dengan susunan B-nomor naskah/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun	Naskah dinas korespondensi ekstern Terbatas diberikan kode "T" pada penomoran dengan susunan T-nomor naskah/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun	Naskah dinas korespondensi ekstern Rahasia diberikan kode "R" pada penomoran dengan susunan R-nomor naskah/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun	Naskah dinas korespondensi ekstern Sangat Rahasia diberikan kode "SR" pada penomoran dengan susunan SR-nomor naskah/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
3	Pengiriman	Tidak ada perlakuan khusus	Naskah dinas harus dimasukkan ke dalam amplop tidak tembus pandang dan disegel dan diberi kode "T" dengan tinta hitam pada amplop	Naskah dinas harus dimasukkan ke dalam amplop tidak tembus pandang rangkap 2 (dua), disegel, dan diberi kode "R" dengan tinta merah pada amplop	Naskah dinas harus dimasukkan ke dalam amplop tidak tembus pandang rangkap 2 (dua), disegel, dan diberi kode "SR" dengan tinta merah pada amplop

NO.	JENIS PERLAKUAN	KLASIFIKASI KEAMANAN			
		BIASA	TERBATAS	RAHASIA	SANGAT RAHASIA
4	Penggunaan	Tidak ada perlakuan khusus	Penggunaan arsip berklasifikasi keamanan Terbatas hanya diperbolehkan untuk pejabat yang berwenang atau ditunjuk. Di luar ketentuan tersebut, penggunaan arsip harus berdasarkan ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan atau setelah mendapat izin	Penggunaan arsip berklasifikasi keamanan Rahasia hanya diperbolehkan untuk pejabat yang berwenang atau ditunjuk. Di luar ketentuan tersebut, penggunaan arsip harus berdasarkan ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan atau setelah mendapat izin	Penggunaan arsip berklasifikasi keamanan Sangat Rahasia hanya diperbolehkan untuk pejabat yang berwenang atau ditunjuk. Di luar ketentuan tersebut, penggunaan arsip harus berdasarkan ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan atau setelah mendapat izin
5	Penggandaan	Tidak ada perlakuan khusus	Pencipta arsip dapat melarang penggandaan arsip berklasifikasi keamanan Terbatas. Penggandaan di luar kebutuhan tidak diizinkan	Pencipta arsip dapat melarang penggandaan arsip berklasifikasi keamanan Rahasia. Penggandaan di luar kebutuhan tidak diizinkan	Pencipta arsip dapat melarang penggandaan arsip berklasifikasi keamanan Sangat Rahasia. Penggandaan di luar kebutuhan tidak diizinkan

B. Pengamanan Arsip

1. Pengorganisasian

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilakukan oleh Unit Kearsipan sesuai jenjangnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pengamanan arsip meliputi:

- a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa folder, guide/sekat, *filing cabinet*, *brankas arsip*, *pocket file*, *boks arsip*, *rak statis*, rak arsip, dan *roll o'pact*. *Filing Cabinet* digunakan untuk arsip aktif dengan klasifikasi keamanan

Biasa/Terbuka dan Terbatas, sedangkan arsip aktif dengan klasifikasi keamanan Rahasia dan Sangat Rahasia menggunakan brankas arsip. Rak arsip digunakan untuk arsip inaktif dengan klasifikasi keamanan Biasa/Terbuka, sedangkan untuk arsip inaktif dengan klasifikasi keamanan Terbatas menggunakan *roll o'pact* dan brankas arsip untuk arsip inaktif dengan klasifikasi keamanan Rahasia dan Sangat Rahasia;

- b. sarana penyimpanan arsip elektronik berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
 - c. sarana temu kembali berupa Daftar Arsip Aktif, Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Vital, dan Daftar Arsip Terjaga;
 - d. sarana berupa aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif;
 - e. prasarana berupa ruang penyimpanan dan gedung penyimpanan yang representative sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
 - f. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas/cctv, kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip;
3. Sumber Daya Manusia

Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan oleh Pejabat Struktural di bidang Kearsipan, Arsiparis dan Pejabat Pelaksana Kearsipan di *Central File* dan *Record Center*.

III. KLASIFIKASI AKSES ARSIP

Pengguna yang berhak untuk mengakses arsip meliputi pengguna internal dan eksternal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

A. Pengguna Internal

Pengguna yang diberikan hak akses di lingkungan internal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

- b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya;

- c. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan, sebagai Pimpinan Unit Organisasi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan yang 1 (satu) level dengan unit organisasi di luar unit organisasinya, kecuali telah mendapatkan izin;
 - d. Staf Ahli Menteri dapat mengakses seluruh arsip sesuai bidangnya setelah mendapat izin dari Pimpinan Unit Organisasi yang terkait;
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada level di atasnya dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin;
 - f. Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, atau staf yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat Klasifikasi Biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat Klasifikasi Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia yang terdapat pada level di atasnya kecuali telah mendapatkan izin; dan
 - g. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.
- B. Pengguna yang diberikan hak akses di lingkungan eksternal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:
- b. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan tingkat Klasifikasi Biasa/Terbuka;

- c. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip untuk melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
- d. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KAPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE